

RENCANA KERJA

(R E N J A)

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**

TAHUN 2022



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**

KABUPATEN TEMANGGUNG

Tahun 2022

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA DPPAPPKB TAHUN 2022

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DPPAPPKB TAHUN 2022

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal :

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia
Dan Pemerintahan

Sub Koordinator
Pembangunan Manusia
Dan Pemerintahan

Rinawati Heri Prastuti,SE.MM
NIP. 197305011996032004

Eko Budi Mulyatno,SE.MM
NIP. 196811171990031002

Mengetahui

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR VERIFIKASI	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan	4
1.2. Landasan Hukum	10
1.3. Maksud dan Tujuan	12
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020	13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	80
BAB IV PENUTUP	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

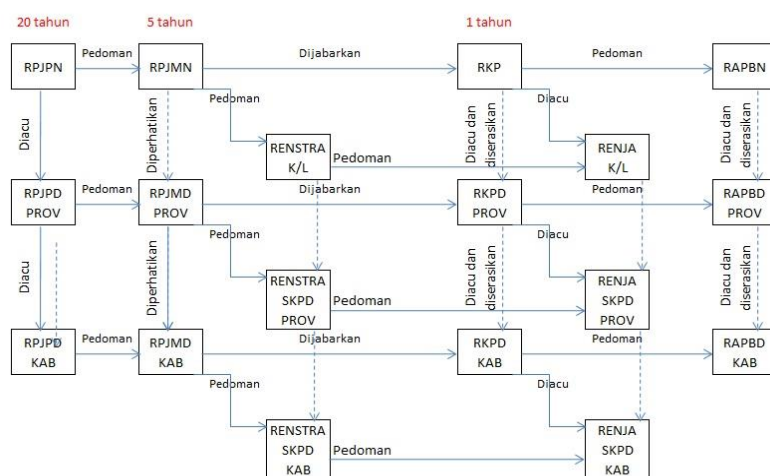
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja DPPPAPPKB Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja DPPPAPPKB Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja DPPPAPPKB, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPDP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal DPPPAPPKB, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan DPPPAPPKB;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana DPPPAPPKB;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPPPAPPKB tahun sebelumnya;

- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra DPPPAPPKB;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan DPPPAPPKB;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan DPPPAPPKB);
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan DPPPAPPKB; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan DPPPAPPKB.

b. Analisis gambaran pelayanan DPPPAPPKB

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan DPPPAPPKB adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan DPPPAPPKB.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra DPPPAPPKB untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada DPPPAPPKB

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPPPAPPKB tahun lalu berdasarkan Renstra DPPPAPPKB.

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul

terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DPPPAPPKB Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra DPPPAPPKB dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra DPPPAPPKB tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra DPPPAPPKB;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra DPPPAPPKB dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra DPPPAPPKB) sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPPPAPPKB tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra DPPPAPPKB.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan DPPPAPPKB dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DPPPAPPKB;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DPPPAPPKB;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DPPPAPPKB;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk DPPPAPPKB.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPPPAPPKB.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi DPPPAPPKB.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh DPPPAPPKB. Namun dalam proses ini DPPPAPPKB mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh DPPPAPPKB terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan DPPPAPPKB dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB;

Penyusunan dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja DPPPAPPKB.

Penyempurnaan rancangan Renja DPPPAPPKB perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja DPPPAPPKB dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DPPPAPPKB Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja DPPPAPPKB untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPPAPPKB.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja DPPPAPPKB Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAPPKB selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan DPPPAPPKB Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan DPPPAPPKB Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) DPPPAPPKB Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja DPPPAPPKB Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB Tahun 2020 dan Capaian Renstra DPPPAPPKB Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja DPPPAPPKB Tahun 2020 terhadap capaian renstra DPPPAPPKB Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja DPPPAPPKB sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra DPPPAPPKB Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra DPPPAPPKB 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB
s.d Tahun 2020

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGI- ATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
20203	Program peningkatan kualitas hidup			1.305.000.000		198.601.136		255.000.000	76.400.640		20.860.100		10.291.440		8.886.875		30.159.050		70.197.465		91,88		268.798.601		20,60		
		Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak	%	25		16		25,90		0,022		0,022		0,022		0,022		0,022		100		0,022		100			
		Persentase keterwakilan perempuan di	%	2,34		1,89		2,31		2,12		2,08		2,02		2,02		2,02		87,45		2,02		86,32			
		Persentase Perempuan dan anak korban	%	0,01		0,008		0,14		0,01		7,68		5,88		0,008		0,008		100		0,008		100			
		Persentase terbentuknya kecamatan layak	%	60,00		40		20		55		60		60		60		60		100		60		100			
		Rasio Perangkat Daerah yang menerapkan	angka	45,71		28,57		38,57		43,48		43,48		43,48		43,48		43,48		100		43,48		95,12			
202.03.002	Advokasi dan Pengembangan Kota Layak (KLA)	Terfasilitasinya kegiatan KLA dan penyusunan	bin	40	290.000.000	8	54.253.486	8	80.000.000	18.561.300	3	13.196.100	0	795.000	2	0	2	4379700	7	18.370.800	87,5	98,97	15	72.624.286	37,5	25,04	
		pembentukan desa/kelurahan, kecamatan layak	kecamatan /desa/kelurahanlayak	40		7		8			3		2	2		16		23	0	100	0	30	0	75,00	0		
202.03.003	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan	1. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan	organisasi perempuan	35	130.000.000		14.741.250	7	20.000.000	5.218.800	0	0	7	0	0		5.191.200	7	5.191.200	100	99,47	7	19.932.450	20,00	15,33		
202.03.004	Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Persentasi Perempuan dan Anak Korban	Terlaksananya Fasilitas	145	134.000.000	29	13.261.200	100	20.000.000	4.279.000	11	1.775.000	43	775.700	24	0	0	0	78	2.550.700	78	59,61	107	15.811.900	73900	11,80	
202.03.005	Penyelenggaraan Kegiatan Forum Anak	terlaksananya program forum Anak	forum anak	5	150.000.000	1	21.222.400	1	20.000.000	7.953.240	0	0	0	2.626.240	1	5.316.875		0	1	7.943.115	100	99,87	2	29.165.515	40,00	19,44	
202.03.006	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	telaksananya 2 kali rakor PUG dan data pilah, 1 kali	kegiatan	25	114.000.000	5	18.099.700	5	30.000.000	7.995.800	1	1.053.000	0	0	3	2.020.000	1	1.009.950	5	4.082.950	100	51,06	10	22.182.650	40,00	19,46	
202.03.007	Peningkatan Kapasitas Organisasi	1. advokasi isu strategis PPPA kepada organisasi	kegiatan	15	186.000.000	3	28.165.200	3	25.000.000	27.329.500	1	1.943.000	4	5.894.500	3	1.550.000	5	17.640.700	13	27.028.200	100	98,90	16	55.193.400	100	29,67	
202.03.008	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu	1 kali rapat koordinasi P2TP2A, 2 kali pelatihan	kegiatan	15	130.000.000	3	13.841.000	3	10.000.000	5.063.000	1	2.893.000	1	200.000	0	0	1	1.937.500	3	5.030.500	100	99,36	6	18.871.500	40,00	14,52	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGI- TAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET																				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																													
202.03.009	Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan	terlaksananya pelatihan kepemimpinan	orang	350	171.000.000	70	35.016.900	70	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	35.016.900	20,00	20,48																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						85,06				8.252,51																					
Predikat																						Tinggi																									
20801	Program pengendalian penduduk dan			3.243.000.000		134.441.100		903.000.000	280.678.250		27.205.000		11.736.300		51.409.825		152.816.700		243.167.825		86,64			377.608.925		11,64																					
		Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100																					
		Persentase pasangan usia subur yang ingin	%	6,5		11,5		6,83		11,58		11,58		11,58		13,76		13,76		13,76		0		13,76		0																					
		Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya	%	2,04		1,52		2,07		1,53		1,87		1,86		2,16		2,16		2,16		95,65		2,16		94,12																					
		Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 th (ASFR 15-19 th)	angka	26,3		29,43		27		2,94		29,42		29,42		21,32		21,32		21,32		78,96		21,32		100																					
208.01.001	Pelayanan KIE KB	Tersampainya Program KB kepada masyarakat	sekolah	50	300.000.000	10	24.697.000	10	70.000.000	54.737.730	1	12.375.000	3	9.472.500	3	7.820.000	1	1.110.000	8	30.677.500	80,00	56,04	88	55.374.500	100	18,46																					
208.01.003	Penunjang DAK	Terlaksananya Kegiatan DAK	bulan	60	260.000.000	12	40.893.700	12	50.000.000	38.538.000	3	8.408.000	3	870.000	3	7.405.000	3	18.990.800	12	35.673.800	100	92,57	24	76.567.500	40,00	29,45																					
208.01.005	Pendataan keluarga, pencatatan dan	Terdatanya jumlah KK, PUS, Peserta KB dan Tahapan KS	bulan	60	673.000.000	12	68.850.400	12	358.000.000	7.232.620	3	5.388.000	3	248.800	3	0	3	1.343.800	12	6.980.600	100	96,52	24	75.831.000	40,00	11,27																					
208.01.006	Peningkatan Kapasitas PPKBD, dan	Terlathinya PPKBD 290 orang, Sub PPKBD 1619 orang	orang	7836	1.680.000.000	10	0	1959	400.000.000	166.529.900	196	134.000	592	523.000	425	34.513.700	1138	124.196.100	2351	159.366.800	100	95,70	2.361	159.366.800	30,13	9,49																					
208.01.007	Rakor Tim Pembina KB Tingkat Kabupaten	Terlaksananya koordinasi tingkat Kabupaten	kegiatan	48	330.000.000	10	0	12	25.000.000	13.640.000	3	900.000	3	622.000	3	1.671.125	3	7.276.000	12	10.469.125	100	76,75	22	10.469.125	45,83	3,17																					
208.01.008	Penyusunan Raperda Pengendalian			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						80,00				42,66																					
Predikat																						Tinggi																									
20802	Program kesepertaan dan peningkatan			35.634.412.800		5.529.268.279		560.000.000	6.696.920.150		281.692.308		241.305.121		1.532.918.287		2.123.091.563		3.209.026.179		47,92			8.738.294.458		24,52																					
		Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan	%	90,08		83,3		86,28		83,06		83,01		82,89		82,61		82,61		82,61		95,75		82,61		91,71																					
		angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive)	%	82		77,57		80,78		77,45		77,49		77,69		74,71		74,71		74,71		92,49		74,71		91,11																					

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA 2023		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																					
		Persentase kepesertaan KB aktif	%	82		77,57		80,78			77,48		77,49		77,69		74,71		74,71		92,49		74,71		91,11																							
		Persentase keberhasilan pemakaian	%	50,35		48,02		49,65			47,7		47,38		47,23		45,38		45,38		91,40		45,38		90,13																							
208.02.004	Kegiatan Pelayanan Pemasangan	terlaksananya kegiatan pelayanan pemasangan	orang / kasus	24265	2.580.000.000	20	185.796.500	4853	300.000.000	63.319.750	631	8.236.000	246	3.212.250	1839	23.989.000	2103	27.438.750.000	4819	62.876.000	99.29919	99,30	4.839	248.672.500	19,94	9,64																						
		pelatihan bidan untuk pelayanan KB pasca	orang	15		0		15			0		6		0				6	0	40		6	0	40,00	0																						
208.02.005	Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan	tersedianya sarana dan prasarana KB	kegiatan	5	7.613.000.000	1	1.299.061.000	1	0	1.300.000.000	0	0	0	0	1	595.769.000	0	341.170.500	1	936.939.500	72,7	46	2	2.236.000.500	40,00	29,37																						
208.02.006	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	terlaksananya kegiatan DAK non fisik	kegiatan	5	25.281.412.800	1	4.044.410.779	1	0	5.271.304.000	0	270.411.308	0	236.817.871	0	904.370.658	1	739.061.613	1	2.150.661.450	59,2	40,80	2	6.195.072.229	40,00	24,50																						
208.02.007	Kegiatan Masyarakat Peduli KB	Terlaksananya kegiatan masyarakat peduli	Moment	40	160.000.000	10	0	10	70.000.000	7.861.400	2	1.010.000	1	725.000	2	550.000	5	5.445.000	10	7.730.000	100	98,33	20	7.730.000	50,00	4,83																						
208.02.008	Pengembangan dan pemantapan Kampung KB	Terfasilitasinya Pengembangan Kampung KB COE	Terlaksananya 1 Kampung	80	0	0	0	10	190.000.000	54.435.000	1	2.035.000	3	550.000	3	8.239.629	3	39.994.600	10	50.819.229	100	93,36	10	50.819.229	12,50	#DIV/0!																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					78,53																											
Predikat																					Tinggi																											
20803	Program peningkatan kualitas dan			815.000.000		39.978.250		175.000.000	81.889.300		10.168.800		39.134.800		19.846.322		12.316.600		81.466.522		99,48372		121.444.772		14,90																							
		Persentase keluarga sejahtera III	%	47,5		25,92		46			25,92		25,92		25,92		27,11		27,11		58,93		27,11		57,07																							
		Persentase keluarga sejahtera III plus	%	4,3		1,88		4			1,88		1,88		1,88		1,96		1,96		49,00		1,96		45,58																							
		Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks	%	48,33		29,68		48,33			93,94		31,73		33,85		33,85		33,85		70,04		33,85		70,04																							
208.03.001	Pembinaan Tribina (BKB, BKR, BKL)	Terbinanya pembinaan BKB, BKR dan BKL	kelompok	100	185.000.000	20	39.978.250	80	40.000.000	9.329.200	26	2.989.800	33	3.792.000.000	17	1.939.350	5	557.500	80	9.278.650	99	99,46	0	49.256.900	0	26,63																						
208.03.006	Koordinasi Penguatan Ekonomi	Terfasilitasinya Kelompok UPPKS dalam	Meningkatnya pendapatan		130.000.000	20	0	80	40.000.000	6.096.200	0	0	33	2.484.500.000	27	2.042.600	20	1.539.100	80	6.066.200	99,51	99,51	100	6.066.200	0	4,67																						
		Terfasilitasinya Pelatihan Batik bagi Kelompok	Mengembangkan Batik Temanggun			0		40			0		0		0				0	0	0		0	0	0	0																						
		Terfasilitasinya BPC AKU	BPC AKU dapat eksis di			0		20			0		0		0				0	0	0		0	0	0	0																						
		Terfasilitasinya Pameran Produk UPPKS	Produk UPPKS bisa dipromosik			0		20			0		0		0				0	0	0		0	0	0	0																						

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
208.03.007	Pembi naan Gener	Terfasilitasinya Pemilihan Lomba Duta GenRe, GenRe TK	Terpilihnya Duta GenRe TK		175.000.000	20	0	40	25.000.000	37.403.400	0	2.387.500	80	26.948.300	1	6914372	0	950000	81	37.200.172	100	99,46	101	37.200.172	100	21,26																						
		Terfasilitasinya Sosialisasi Pendewasaan Usia	Menurunya Angka Pernikahan			0		120			0		21		0				21	0	17,5		21	0	100																							
		Terfasilitasinya Kegiatan Saka Kencana	Terbentuk nya dan terwujudnya			0		70			20		21		0				41	0	58,57		41	0	100																							
208.03.008	Koordinas dan Fasilitasi Program KKBPK	Terfasilitasinya Lomba BKR dan PK Remaja	Terwujud Generasi Berencana		325.000.000	3	0	100	70.000.000	29.060.500	16	4.791.500	20	5.910.000	31	8.950.000	32	9.270.000	81	28.921.500	81,00	99,52	84	28.921.500	100	8,90																						
		Terfasilitasinya Lomba Kampung KB	Terpilihnya Pengemban gan			0		100			0			0		0			0		0,00		0	0	0	-																						
		Terfasilitasinya Kegiatan PPKS	Meningkat nya Kualitas			0		100			20		0		0				20	0	20,00		20	0	100	0																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				59,50							45,45																					
Predikat																																																
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan	Persentase penyelesaian dokumen	%	100	25.000.000	100	4.827.000	100	5.000.000	4.264.200	21,21	895.800	51,52	1.411.550	75,76	0	100		100	4.162.600	100	97,62	100	8.989.600	100	35,96																						
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan	Terlaksananya penyusunan dokumen	dokumen	167	25.000.000	34	4.827.000	33	5.000.000	4.264.200	7	895.800	10	1.411.550	8	0	8	1.855.250	33	4.162.600	100	97,62	67	8.989.600	40,12	35,96																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				100																												
Predikat																																																
40702	Program pelayanan administrasi	Persentase pemuhan kebutuhan	%	100	2.260.794.000	100	392.524.606	100	521.213.500	542.442.500	100	108.817.005	100	118.178.281	100	123.387.642	100		100	513.992.542	100	94,76	100	906.517.148	100	40,10																						
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bin	60	180.000.000	12	30.122.876	12	35.000.000	35.000.000	3	7.675.914	3	7.522.714	3	8.302.427	3	8.828.982	12	32.330.037	100	92,37	24	62.452.913	40,00	34,70																						
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	bin	60	23.000.000	12	6.658.250	12	5.000.000	5.000.000	3	648.500	3	678.500	3	1.022.250	3	2.532.000	12	4.881.250	100	97,63	24	11.539.500	40,00	50,17																						
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bin	60	135.000.000	12	26.418.100	12	23.639.000	23.639.000	5	4.105.800	3	4.023.000	3	5.960.400	3	9.467.700	14	23.556.900	100	99,65	26	49.975.000	43,33	37,02																						
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	bin	60	50.000.000	12	14.607.000	12	14.324.500	14.324.500	3	1.816.000	3	1.872.000	3	3.154.250	3	6.713.000	12	13.555.250	100	94,63	24	28.162.250	40,00	56,32																						
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	bin	60	12.000.000	12	3.952.500	12	2.000.000	2.000.000	3	180.000	3	620.000	3	1.018.500	3	0	12	1.818.500	100	90,93	24	5.771.000	40,00	48,09																						
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Meningkatnya pengetahuan pegawai,dengan	bin	60	6.800.000	12	1.900.000	12	1.800.000	1.320.000	3	180.000	3	180.000	3	270.000	3	450.000	12	1.080.000	100	81,82	24	2.980.000	40,00	43,82																						

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya mkan minumrapat,tamu dan harian pegawai	bln	60	60.000.000	12	10.226.650	12	25.000.000	21.729.000	3	3.535.400	3	3.326.400	3	4.759.920	3	7.876.040	12	19.497.760	100	89,73	24	29.724.410	40,00	49,54		
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	bln	60	162.250.000	12	41.952.600	12	30.450.000	30.450.000	1	9.691.000	3	0	2	0	5	20.616.000	11	30.307.000	100	99,53	23	72.259.600	38,33	44,54		
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	bln	60	131.200.000	12	17.230.000	12	20.000.000	9.250.000	3	380.000	3	5.090.000	3	0	3	2.725.000	12	8.195.000	100	88,59	24	25.425.000	40,00	19,38		
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	tersedianya pembayaran honor Non	bln	60	1.148.544.000	12	239.456.630	12	280.000.000	282.400.000	3	66.500.903	3	66.579.843	3	67.078.343	3	72.579.340	12	272.738.429	100	96,58	24	512.195.059	40,00	44,60		
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya penjaga malan dan/atau Satpam	orang	20	352.000.000	6	0	6	84.000.000	117.330.000	1,5	14.103.488	1,5	28.285.824	1,5	31.821.552	1,5	31.821.552	6	106.032.416	100	90,37	12	106.032.416	60,00	30,12		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				100					41,97			
Predikat																				Sangat Tinggi								
40703	Program peningkatan sarana prasarana	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana	%	100	490.000.000	100	106.272.401	100	75.000.000	200.420.000	100	13.011.242	100	8.723.820	100	19.453.100	100		100	127.975.944	100	63,85388	100	234.248.345	100	47,81		
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terawatnya peralatan gedung kantor	bln	60	5.000.000	12	4.910.000	12	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4.910.000	20,00	98,2		
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	bln	60	50.000.000	12	9.460.000	0	0	8.160.000	3	8.160.000	3	0	3	0	3	0	12	8.160.000	100	100	24	17.620.000	40,00	35,24		
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Tersedianya service,pembelian suku	bln	60	400.000.000	12	77.367.401	12	70.000.000	67.260.000	3	4.851.242	3	7.668.320	3	13.497.000	3	27.650.732	12	53.667.294	100	79,7908	24	131.034.695	40,00	32,76		
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Tersedianya peralatan gedung kantor				24	14.535.000	12	0	15.000.000	3	0	3	1.055.500	3	5.956.100	3	2.458.500	12	9.470.100	100	63,134	89	24.005.100	100	68,59		
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Tersusunnya DED Pembangunan Balai Penyuluh KB	bln	60	35.000.000	0	0	0	0	110.000.000	0	0	0	0	0	0	0	56.678.550	0	56.678.550	100	51,52595	0	56.678.550	0	162		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				100				40,00				
Predikat																				Sangat Tinggi								
40704	Program peningkatan disiplin aparat	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan	%	100	22.500.000	100	0	100	11.250.000	11.250.000	100	0	100	0	100	0	100		100	11.137.500	100	99	100	11.137.500	100	49,50		
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta	Meningkatnya disiplin pegawai	kegiatan	71	22.500.000	45	0	45	11.250.000	11.250.000	0	0	0	0	0	0	45	11.137.500	45	11.137.500	100	99	90	11.137.500	100	49,5		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				100				100				
Predikat																				Sangat Tinggi								
JUMLAH					87.591.413.600	1.513	12.811.825.544	558	2.505.463.500	7.894.265.040	321	462.650.255	352	430.781.312					4.261.126.577					10.667.039.349			1.074,56	49,50
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																				87,89	53,98			1.074,56	49,50			

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28														
																				PREDIKAT		Tinggi																			

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra DPPPAPPKB Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPPPAPPKB di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAPPKB berupa:

1. Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Capaian Kinerja : 100 % kategori memuaskan
2. Program Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
Capaian Kinerja : 100 % kategori memuaskan
3. Program Kepesertaan Pelayanan KB
Capaian Kinerja : 91,71 % kategori Tinggi
5. Program Peningkatan kualitas Ketahanan keluarga
Capaian Kinerja : 57,07 % kategori Rendah
6. Program Perencanaan evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah.
Capaian kinerja : 100 % sangat Tinggi
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian Kinerja : 100 % Sangat Tinggi
1. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Program Kepesertaan Keluarga Berencana.
Capaian Kinerja : 91,71 % kategori Tinggi
 - b. Program Peningkatan kualitas dan Pembinaan Ketahanan Keluarga.
Capaian Kinerja : 57,07% kategori Rendah

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DPPPAPPKB. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa DPPPAPPKB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum

mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **sangatBaik** yaitu dengan nilai **87,34 %**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagaimana tabel berikut :

A.Pencapaian Kinerja dan sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

NO	Sasaran	Jumlah indikator	Rata - rata Capaian	Keterangan (kategori)
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	2	100	Memuaskan
2	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	4	96,33	Sangat baik
3	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1	77,50	Baik
4	Pengendalian penduduk dan informasi keluarga	4	80,56	Baik
5	Kepesertaan dan Pelayanan KB	4	91,01	Sangat baik
6	peningkatan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga	3	57,60	Cukup
Jumlah		18	87,34	Sangat baik

Dari Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB

2.2.1.Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2.1
 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DPPPAPKB (**Laporan IKPD**)
 Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2020 (%)	Statu s
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	94,55	94,45	94,35	94,25	94,15	95,62	95,62		..		100	TT
2	Persentase perempuan anak korban kekerasan	%	0,015	0,014	0,013	0,012	0,01	0,009	0,008		..		100	TT
3	Prevalensi terhadap anak perempuan kuban kekerasan	%	26	25,9	25,67	25,56	25	100	0,022				100	TT
4.	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,30	2,31	2,32	2,33	2,34	1,89	2,02				86,53	AT
5	Persenase terhadap anak perempuan kuban kekerasan	%	0,015	0,014	0,013	0,012	0,01	0,009	0,008				100	TT
6	Persentase terbentuknya kota layak anak	%	20	20	30	50	60	40	60				100	TT
7	Rasio PD yang menerapkan kebijakabresponsig gender dalam penyusunan ARG	%	32,28	38,57	38,57	38,57	45,7	43,48	43,48				95,12	AT
8	Laju pertumbuhan Penduduk	%	0,84	0,83	0,82	0,81	0,8	0,88	0,98		..		77,50	AT
9	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kel.	%	100	100	100	100	100	100	100		..		100	TT
10	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed	%	6,9	6,83	6,72	6,65	6,5	11,44	13,76		..		0	UK
11	pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	2,6	2..08	2,07	2,06	2,05	2,04	2,16				93,89	AT

12	Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)	%	27,20	27,00	26,80	26,50	26,30	29,43	21,32				100	TT
13	presentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	85,10	86,28	87,36	90,08	90,1	83,03	82,61				91,71	AT
14	Angka pemakaian kontrasepsi (<i>contraseptive prevalence rate/CPR</i>)	%	79,79	80,78	81,23	81,34	82	77,50	74,71				91,10	AT
15	Persentase kepesertaan KB aktif	%	79,79	80,79	81,23	81,34	82,00	77,50	74,71				91,10	AT
16	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	49,45	49,65	49,85	50,15	50,4	48,02	45,38				90,13	AT
17	Persentase keluarga sejahtera III	%	45,6	46	46,5	47	47,5	25,92	27,11				57,07	AT
18	Persentase keluarga sejahtera III Plus	%	3,8	4	4	4,2	4,3	1,88	1,96				45,68	AT
19	Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	%	48,33	48,33	48,33	48,33	48,33	29,82	33,85				70,03	AT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 7 terdiri dari:
 - a. Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG) masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Tingginya angka harapan hidup perempuan sebagai salah satu indikator I
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - Masih rendahnya penghasilan perempuan.
 - Harapan lama sekolah bagi perempuan masih terjadi disparitas.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah riview target RPJMD/Target yang seharusnya naik tertulis menurun.
 - b. Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan Faktor pendorong indikator tersebut adalah :
 - 1) Faktor Pendorong Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas
 - 2) Faktor Penghambat Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas , Belum terbentuknya UPT PPPA
 - 3) Penguatan kapasitas pendampingan korban dan perluasan jejaring kerja penanganan
 - c. Pravelensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan
 - 1) Faktor Pendorong Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas
 - 2) Faktor Penghambat Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping.
 - d. Presentase perempuan dan anak korban kekerasan
 - 1) Faktor Pendorong Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas.
 - 2) Faktor Penghambat Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah

- Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping.
- e. Presentase terbentuknya Kecamatan Layak Anak (KLA)
 - 1) Faktor Pendorong Adanya Integrasi dengan program lain yang mendukung Kelana(Kecamatan layak anak).
 - 2) Faktor Penghambat Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping.
 - f. Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kel.
 - 1) Faktor Pendorong Adanya kegiatan Pendataan dan Up dating data keluarga.
 - 2) Faktor Penghambat Lemahnya sistem pelaporan (RR) dan administrasi di tingkat RT
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan pendataan mikro keluarga Adanyan perda tentang pengendalian penduduk dan KB.
 - g. Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)

Pengembangan life skill bagi remaja,tingkat pendidikan wajar 12 tahun

 - 1) Faktor Penghambat Belum tersedianya data ASFR setiap tahun karena mulai tahun 2015 pendataan dilaksanakan 5 tahun sekali, untuk tahun 2020 belum bisa dilaksanakan karena pandemi covid 19.
 - 2) Faktor Pendorong Belum tersedianya data ASFR setiap tahun karena mulai tahun 2015 pendataan dilaksanakan 5 tahun sekali, untuk tahun 2020 belum bisa dilaksanakan karena pandemi covid 19.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Up dating data sebagai perhitungan ASFR.
2. Capaian indikator dengan status Akan Tercapai ada 11 terdiri dari;
- a. Presentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah
 - 1) Faktor pendorong adalah; Meningkatnya harapan lama sekolah perempuan mendorong meningkatnya keterwakilan perempuan dilembaga pemerintah.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah: Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dipengaruhi peluang seleksi.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Penguatan advokasi dan edukasi keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan
- b. Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD.
- 1) Faktor pendorong adalah;adanya bintek yang mendorong OPD untuk menyusun ARG.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah: masih kurangnya pemahaman petugas dalam penyusunan ARG
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Penguatan dan pendampingan dalam penyusunan ARG.
- c. Laju pertumbuhan penduduk
- 1) Faktor penghambat indikator tersebut adalah; Meningkatnya KIE kepada masyarakat tentang Pengendalian penduduk
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Masih tingginya angka kelahiran (CBR).
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Peningkatan jejaring dalam pelaksanaan program KKBPK Baik pemerintah maupun swasta melakukan Advokasi dan bintek kepada kades dalam program KKBPK.
- d. Presentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun
- 1) Faktor Pendorongnya adalah;
 - terintegrasinya kegiatan BKR(Bina keluarga Remaja) dan Pik(Pusat Informasi konseling) remaja
 - peningkatan kursus calon pengantin oleh lintas sektoral
 - pengembangan life skill bagi remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah; Masih kurangnya SDM pengelola program KKBPK dilapangan dalam memberikan advokasi dan KIE pada masyarakat dan remaja
Masih aturan pemerintah yang berbeda antar OPD.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah;

Melakukan promosi , KIE melalui media cetak , Elektronik

- e. Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)
- 1) Faktor Pendorongnya adalah;
 - Pengembangan life skill bagi remaja
 - tingkat pendidikan wajar 12 tahun kehidupan berkeluarga
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah; Belum tersedianya data ASFR setiap tahun karena mulai tahun 2015 pendataan dilaksanakan 5 tahun sekali, untuk tahun 2020 belum bisa dilaksanakan karena pandemi covid 19.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Up dating data sebagai perhitungan ASFR
- f. presentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah;
 - tingginya kesadaran masyarakat (PUS) untuk berKB
 - Tingginya KIE, Advokasi kepada masyarakat dan stake holder
 - mobilitas media sosial dalam penyampaian jenis alat kontrasepsi dan side effect.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah;
 - tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi moderen
 - PUS muda .yang menikah diusia dini belum terbekali dengan pengetahuan jenis alokon
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Melakukan promosi , KIE melalui media cetak , Elektronik
- g. Angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate / CPR)
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah;
 - Tingginya kesadaran masyarakat (PUS) untuk ber KB.
 - Tingginya KIE, Advokasi kepada masyarakat dan stake holder.
 - Mobilitas media sosial dalam penyampaian jenis alat kontrasepsi dan side effect.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - Tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi moderen
 - PUS muda .yang menikah diusia dini belum terbekali dengan pengetahuan jenis alokon.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Melakukakan promosi , KIE melalui media cetak , Elektronik
- h. Persentase kepesertaan KB aktif
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah;
 - Tingginya kesadaran masyarakat (PUS) untuk ber KB.
 - Tingginya KIE, Advokasi kepada masyarakat dan stake holder 3. mobilitas media sosial dalam penyampaian jenis alat kontrasepsi dan side effect.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - Tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi moderen.
 - PUS muda .yang menikah diusia dini belum terbekali dengan pengetahuan jenis alokon Adanya kebijakan yang berbeda antar pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan sasaran program.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Peningkatan kapasitas tim pengelola KKBPK dari institusi yang paling Bawah.
- i. Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah;
 - Tingginya Animo Masyarakat dalam penggunaan alakon Implan
 - Pemahaman masyarakat tentang alat kontrasepsi MKJP lebih efektif dan praktis.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - Masih tingginya Rhumor kegagalan IUD di masyarakat.
 - untuk pelayanan MOP belum ada tenaga yang bersertifikat.
 - Biaya pelayanan tinggi , anggaran belum mendukung.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah;
 - Melakukan promosi , KIE melalui media cetak maupun elektronik.
- j. Persentase keluarga sejahtera III
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah; Meningkatnya faktor Ekonomi, Sosial dan Pendidikan dalam keluarga.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah: Masihnya lemahnya pemahaman keluarga tentang indikator

peningkatan kesejahteraan keluarga.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; riview target RPJMD (karena data sudah tidak tersesien dalam indikator pendataan keluarga).

k. Persentase keluarga sejahtera III Plus.

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah; tingkat sosial dan kepedulian yang tinggi dari masyarakat.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah: Kurangnya kesadaran masyarakat/keluarga yang bergolong mampu untujk membantu mengentaskan kemiskinan di lingkungannnya
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; riview target RPJMD (karena data sudah tidak tersesien dalam idikator pendataan keluarga).

l. Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM).

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah;
 - Belum adanya Perda dan Perbup tentang kampung KB
 - Kurangnya koordinasi dengan linsek
 - Sosialisasi tentang hakekat dan tujuan kampung KB masih kurang
 - Belum semua pokja kampung KB mendapatkan pelatihan
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - Potensi kader dalam mendukung Program
 - Partisipasi masyartakat dalam mendukung kampung KB
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; eningkatan advokasi dan KIE dengan melibatkan LSOM melakukan jejaring dalam pelaksanaan program kampung KB.

3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 1 , yaitu :

- a. Prosentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB Tidak terpenuhi (un met need) sebesar 13 ,76 % atau 0 % dari target renstra
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Meningkatnya kegiatan KIE kepada PUS untuk Ber KB dan Meningkatnya koordinasi kepada KKB dalam pelayanan KB

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - a. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya ikut KB
 - b. Rendahnya pemahaman batasan PUS bisa hamil (merasa tua tidak perlu KB)
 - c. masih tinggi angka pernikahan dibawah 20 tahun , yang mengakibatkan masa reproduksi seorang wanita panjang , yang berakibat jenuhnya menggunakan alat kontrasepsi
 - c. Adanya pandemi covid . 19 ,yang berdampak kegiatan pelayanan KB tidak bisa optimal.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Mengoptimalkan advokasi program KKBPK kepada stake holder dan masyarakat , tentang pentingnya ber KB ,dan peningkatan kapasitas bagi pengelola program KKBPK baik lintas sektoral maupun Institusi Masyarakat Pedesaan / IMP atau kader KB

2.2.2.Data Pokok

Data Pokok pada DPPAPKB terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Data Pokok Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , dengan rincian sebagai berikut:

A. Data Pokok Bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

1. Indek Pembangunan Gender

Indek Pembangunan Gender (IPG) adalah Pencapaian kemampuan pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG ini digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan (indek yang ada indikator pembangunan manusia yang dipilah gender)

Untuk memperoleh angka Indek Pembangunan Gender dapat diperoleh dari perhitungan yang ada di BPS.

Ada beberapa indikator untuk mengukur IPG yang diantaranya meliputi :

- Angka Harapan Hidup
- Harapan lama Sekolah
- Rata – rata lama Sekolah
- Penghasilan perkapita

IPG Kabupaten Temanggung selama 6 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Realisasi 2020 (*variabel 1*) tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel A.1
Indek Pembangunan Gender
Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indek Pembangunan Gender (IPG)	94,75	94,75	96,00	94,65	94,55	94,45

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2019

Dari tabel 1 bahwa IPG Kabupaten Temanggung tahun 2015 diperoleh angka sebesar 94,75, sedangkan pada tahun 2016 , tidak ada perhitungan pada tahun tersebut , jadi masih menggunakan angka 2015, . Berdasarkan Laporan pembangunan manusia berbasis gender Kementrian PP dan PA th 2017 capaian IPG Kab Tmg 96,00 , naik dari tahun 2015/ 2016 , sedangkan untuk tahun 2018 pencapaian kabupaten temanggung sebesar 94,65 menurun dari tahun 2017. Namun pada angka tersebut pencapaian ini lebih tinggi dari IPG tingkat Nasional yang nilainya sebesar 91.03 dan lebih tinggi dari pencapaian tingkat propinsi Jawa tengah sebesar 91,94 %. Untuk tingkat propinsi berada pada rangking 2 se Jawa Tengah .

Tabel A.2
Indikator IPG

Kabupaten Temanggung Tahun 2019

NO	Uraian	Angka Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata Rata Lama Sekolah		Penghasilan Perkapita	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Temanggung	73,62	77,38	12,05	12,28	7,20	6,72	10,70	8,635
2	Jawa Tengah	72,28	76,10	12,62	12,64	7,86	6,87	14,82	9,603

Sumber data BPS

Indikator IPG tabel 2 tahun 2020 s.d Triwulan IV belum tersedia dari BPS sehingga Data yang di sajikan adalah tahun 2019

Jika dilihat dari komposisi IPG yaitu Angka Harapan Hidup perempuan lebih tinggi yaitu 77,38 dibandingkan laki laki 73,62, sedangkan Angka Harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi yaitu 12,62 dibandingkan Angka Harapan lama sekolah laki laki yaitu 12,05, akan tetapi angka Rata rata lama sekolah laki laki lebih tinggi yaitu 7,20 dibandingkan perempuan yaitu 6,72 , sedangkan penghasilan perkapita laki laki lebih tinggi 10,70, dibandingkan dengan perempuan 8,635. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Untuk Pencapaian IPG tahun 2020 sampai pada Triwulan IV ,ini yang mendukung RPJMD kabupaten Temanggung ternyata ada kesalahan target , yang seharusnya target kinerja indikator ini naik , tetapi malah justru menurun .sehingga perlu dilakukan review target di perubahan RPJMD.

Dari pencapaian IPG tersebut ada beberapa faktor yang mendukung indikator tersebut , diantaranya adalah :

1. Faktor Pendorongnya adalah , tingginya Angka harapan hidup perempuan di Kabupaten Temanggung
2. Faktor Penghambat adalah , Masih rendahnya penghasilan Perempuan dan harapan lama sekolah bagi perempuan masih disparitas (perbedaan).

2. Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan

Perempuan dan anak korban kekerasan menurut Peraturan Menteri Negara PPPA No 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, yang di dalamnya termasuk setiap tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap perempuan dan atau anak. berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dalam beberapa bentuk, dan penanganan pun menurut dari bentuk-bentuk kekerasan yang mereka alami.

Rumus persentase perempuan dan anak korban kekerasan adalah jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan ditangani dibandingkan jumlah Perempuan dan Anak.

Di Kabupaten Temanggung tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV sebagaimana Tabel Berikut

Tabel A. 3

Persentase Perempuan dan Anak korban kekerasan Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perempuan dan Anak korban kekerasan	37	39	45	24	48	42
2	Jumlah perempuan dan Anak	492.200	495.237	498.036	500.690	551.996	509.853
3	Persentase	0,0075	0,0079	0,0090	0,0047	0,0094	0,008

Sumber : DPPKBPPA dan BPS tahun 2020

Dari tabel 2.1 presentase perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2015 mencapai angka 0.0075 , dan naik terus sampai dengan tahun 2017.pada dengan tahun 2018 cenderung turun menjadi 0,0047 Akan tetapi pada tahun 2019 naik kembali menjadi 0,0094 . untuk tahun 2020 sampai Triwulan IV turun menjadi 0,008 . berdasar pencapaian tahun lalu dari Triwulan 1 sampai Triwulan IV kasus semakin naik . hal ini juga terjadi di tahun 2020 , namun dibandingkan tahun sebelumnya pencapaian ini turun 0,0014%.

Jika dilihat berdasarkan jenis kekerasan sebagaimana tabel 4 terlihat tren Tahun 2020 Triwulan IV ini ada laporan kasus perbuatan yang tidak menyenangkan sebanyak 7 kasus, kasus pencurian (ABH) sebanyak 9 kasus , dan kasus KDRT sebanyak 9 kasus , dan beberapa kasus lain seperti dalam tabel diatas dan sudah mulai ditindaklanjuti penanganannya.

Jumlah Kasus yang fluktuatif ini sangat dipengaruhi oleh laporan dari korban atau pihak lain yang mengetahui kasus tersebut. Kasus kekerasan perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, dimana yang tanpa atau terlapor lebih sedikit dibandingkan yang tidak melapor. Hal ini karena banyak yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib jika dilaporkan.

Kasus-kasus yang disajikan seperti tersebut diatas telah mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan, yang meliputi layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. Layanan diberikan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan kebutuhan korban. Penanganan kasus tersebut sudah dilakukan oleh lembaga dalam jejaring Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Kecamatan. Namun berdasarkan laporan kasus beberapa tahun dapat disimpulkan kejadian yang dilaporkan hanya dari kecamatan Temanggung, Tlogomulyo Kedu, Selopampang, Kaloran ,Ngadirejo.

Dari analisa kasus diatas dapat dijadikan referensi bersama bahwa upaya pencegahan berupa sosialisasi, edukasi, penyuluhan dan peningkatan kapasitas lembaga penanganan untuk lebih ditingkatkan.Namun demikian hal ini juga ada beberapa faktor penghambat dalam penanganannya , diantaranya adalah ,keterbatasannya dan kemampuan pendamping , dan belum terbentuknya UPT PPPA di kabupaten Temanggung.

3.Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan

Kasus kekerasan terhadap anak perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan anak perempuan secara seksual, psikologis,dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Rumus :kasus kekerasan terhadap anak perempuan yang diadukan dan ditangani dibandingkan dengan jumlah anak perempuan dikalikan 100% .

Tabel A.4
Pervalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kekerasan terhadap anak perempuan yang melapor dan ditangani	36	39	43	15	16	24
2	Jumlah anak perempuan	114.471	114.133	113.739	113.222	111.545	111.545
3	Persentase	0,031	0,034	0,039	0,013	0,014	0,022

Sumber DPPKBPPA tahun 2019

Dari tabel 3.1 terlihat semua kasus yang melapor semuanya 100% tertangani sesuai dengan Standar Operasional Persedur.

Jumlah seluruh kasus yang terjadi pada perempuan dan anak dari tahun 2015 semakin naik pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 semakin menurun dan pada tahun 2019 naik kembali, akan tetap pada tahun 2020 Triwulan IV ini angka naik mencapai 24 kasus.

4. Persentase keterwakilan perempuan di Lembaga Pemerintah

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan keluarga adalah partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat dari jumlah semua angkatan kerja perempuan baik disektor swasta maupun sektor pemerintah.

Sedangkan definisi dari keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada sektor pemerintah.

Rumus : jumlah keterwakilan perempuan dilembaga pemerintah dibanding jumlah perempuan pada angkatan kerja kali 100 %.

Partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2020 sampai triwulan IV sebanyak 2.02%, sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel A.5
Persentase keterwakilan dilembaga pemerintah
Kabupaten Temanggung Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan di lembaga pemerintah	4.227	4.099	4.216	4.508	3.711	3.536
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	190.835	193.193	196.600	182.753	196.675	174.643
	Persentase	2,21	2,21	2,12	2,14	1,89	2,02

Sumber : DPPKBPPPA tahun 2020

Dari table 6 diatas keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah di kabupaten Temanggung cenderung menurun dari tahun 2015 sampai 2017 pada tahun 2018 naik kembali, dan pada tahun 2019

turun kembali, disebabkan pensiun/purna bagi ASN perempuan. dan pada tahun 2020 Triwulan IV persentasenya naik dibanding tahun 2019, namun dibandingkan dengan pencapaian Triwulan III persentasenya turun 0,06 .dari 2,08 menjadi 2,02 .

Untuk jumlah perempuan di lembaga pemerintah angka menurun dari tahun 2019 dibandingkan tahun 2020 Triwulan IV dari 3.711 menjadi 3.536 dikarenakan jumlah angkatan kerja yang dapat terserap di lembaga pemerintahan turun secara nasional dikarenakan efisiensi SDM secara Nasional, serta banyak ASN Perempuan yang telah Purna (Pensiun).

Dari pencapaian keterwakilan perempuan di lembaga Pemerintah di kabupaten Temanggung , dipengaruhi faktor yang menghambat , yaitu : peluang seleksi penerimaan ASN , lebih banyak dari laki laki .

5. Persentase terbentuknya kecamatan layak anak

Kecamatan layak anak menurut Permen PPPA Nomor 11 tahun 2011 adalah sistem pembangunan di tingkat kecamatan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan, masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan yang telah terbentuk gugus tugas dan melakukan pengarusutamaan hak anak.

Indikator-indikator Kecamatan Layak Anak minimal memuat 5 cluster hak anak yaitu:

1. Hak Sipil dan kebebasan lingkungan keluarga
2. Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan .Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya
5. Perlindungan khusus

Rumus Presentase Kecamatan layak anak adalah jumlah kecamatan layak anak dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada dalam satu kabupaten X 100%.

Jumlah kecamatan layak anak di Kabupaten Temanggung tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV sebagaimana tersebut pada

Tabel A.6
Kecamatan Layak Anak Kabupaten Temanggung
Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2015	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kecamatan layak Anak	0	0	0	4	8	12
2	Jumlah Kecamatan	20	20	20	20	20	20
3	Persentase	20%	20 %	20%	20 %	40%	60%

Sumber DPPKBPPA

Hingga saat ini sudah ada 12 kecamatan dan 12 desa/kelurahan rintisan layak anak yang terbentuk,yaitu kecamatan Kranggan, Temanggung, Kedu, Ngadirejo ,Gemawang, Selopampang, Parakan , Kaloran , Tembarak , Jumo, Pringsurat, Bulu dan 8 Kelurahan yaitu Temanggung I, Temanggung II, Butuh, Banyuurip, Kowangan, Jampirejo, Jampiroso dan Kertosari. Pada tahun 2020 kegiatan Kecamatan dan kelurahan/desa layak Anak sifatnya adalah pembinaan dan pengembangan dalam kegiatan kecamatan, desa/kelurahan layak anak, bersama lintas sektoral. Pembentukan rintisan kelurahan layak anak tersebut didasarkan pada pemilikan sarana prasarana baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan indikator desa/ kelurahan layak anak. Sedangkan 12 kecamatan sebagai rintisan pun didasarkan dengan adanya beberapa indikator kecamatan layak anak, dengan adanya indikator tersebut akan kita temukan beberapa hambatan dan masalah yang pada dasarnya adalah merupakan temuan yang harus di selesaikan. Adapapun faktor pendorong dan penghambatnya adalah sebagai berikut;

1.Adanya Integrasi dengan program lain yang mendukung Kelana (Kecamatan layak anak).

2. Faktor penghambatnya adalah Masih rendahnya pendampingan dalam pelaksanaan Kelana (Kecamatan Layak Anak)

3. Belum semua ditingkat Kecamatan terbentuk Forum Anak.

Commented [b1]: Mungkin juga karena kelembagaan Forum Anak di tingkat kecamatan belum terbentuk, sehingga penggeraknya kurang

6. Rasio Perangkat Daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja SKPD

Perencanaan responsif Gender menurut Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan Pengarustamaan Gender di daerah, pasal 1 , bahwa perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender , yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman , aspirasi , kebutuhan , potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki laki .

Salah satu ukuran kontribusi Perempuan dalam merencanakan proses pembangunan,yaitu Perencanaan Pembangunan dengan mempertimbangkan 4 aspek yaitu:

1. Akses
2. Partisipasif
3. Control ,dan
4. Manfaat yang setara bagi laki laki dan perempuan

Dengan mengintegrasikan Aspirasi Kebutuhan permasalahan laki laki dan perempuan ke dalam perencanaan PUG, didasarkan kepada hasil analisis gender yang menggunakan data terpilah /statistik gender. Untuk menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG) digunakan Analisa Gender yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan pembangunan

Rumus perhitungan Rasio PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender dalam penyusunan Renja SKPD adalah jumlah PD yang menerapkan ARG dibandingkan jumlah PD dikalikan 100%.

Tabel A.7
Rasio PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender
dalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten Temanggung
Tahun 2015 s.d 2020 triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PD yang menerapkan ARG	N/A	N/A	23	23	20	21
2	Jumlah PD	N/A	N/A	46	46	48	48
Persentase			N/A	N/A	50,00	41,67	43,75

Sumber DPPKBPPPA

Dari sumber yang dapat kami kumpulkan dapat kami sampaikan beberapa faktor yang mendorong dan yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

1. Faktor pendorongnya adalah adanya bintek yang mendorong OPD untuk menyusun ARG
2. Faktor penghambatnya adalah masih kurangnya pemahaman petugas dalam penyusunan ARG.

Untuk lebih detailnya PD yang telah menyusun dan menganggarkan untuk program ARG sebagaimana di tampilkan pada tabel 10.1 tersebut diatas.

7. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam perekonomian adalah partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan kerja.

Rumus jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan kerja dibanding jumlah perempuan usia angkatan kerja kali 100 %.

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV disajikan pada tabel berikut.

Tabel A.8
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Temanggung 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah angkatan kerja perempuan	190.835	193.193	196.600	182.753	196.675	174.643
2	Jumlah perempuan dalam usia kerja	281.471	285.265	289.011	292.608	296.141	307.055
	Persentase	67,79	67,72	68,02	63,23	66,41	58,87

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung terlihat

fluktuatif, dengan melihat persentase tersebut ada peningkatan jumlah angkatan perempuan dibanding jumlah perempuan dalam usia kerja , terdapat penurunan pada tahun 2015 yaitu 31,12%. Namun dari tahun ke tahun mengalami naik turun,yakni dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan -0,07 % dari 67,79 ke 67,72.tahun 2016 ke 2017 naik 0,3 % dari angka 67,72 ke 68,02 dan tahun 2017 ke 2018 ada penurunan sebesar -4,79 % dari angka 68,02 ke 63,23 sedangkan tahun 2018 ke tahun 2019 naik cukup tinggi 3,18 % dari angka 63,23 ke 66,41 dan pada tahun 2019 ke tahun 2020 sampai Triwulan III turun lagi sekitar -3,01 % dan sampai Triwulan ke IV turun kembali lagi,hal ini dikarenakan pandemi covid 19 yang berakibat banyak tenaga kerja yang di PHK,Untuk jumlah perempuan dalam usia kerja pada tahun 2020 jumlah masih menggunakan data 2019 .

8.Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Peraturan Menteri Negara PPPA No 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga. Yang diantaranya relevansinya dengan tugas dan fungsi PPPA,adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Rumus Rasio KDRT adalah jumlah kasus KDRT dibagi jumlah rumah tangga dikali 1.000

Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Temanggung tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV disajikan pada tabel berikut.

Tabel A.9
Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga Kabupaten Temanggung,
Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KDRT	16	1	4	5	13	9
2	Jumlah Rumah Tangga	245.174	241.177	246.575	251.334	257.391	212.205
3	Rasio KDRT	0,06	0,004	0,016	0,020	0,05	0,004

Meskipun rasio kekerasan dalam rumah tangga 6 tahun terakhir 1:4000 penduduk, namun hal ini cukup memprihatinkan mengingat sudah banyak upaya untuk membangun kepedulian terhadap KDRT, baik melalui *Women Crisis Center (WCC)*, Unit Pelayanan Terpadu (PTT) di setiap kecamatan, PPA (pelayanan Perempuan dan Anak) di Polres, pendampingan dari Dinas Sosial, koordinasi lintas sectoral melalui P2TP2A (pos pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak) dan optimalisasi peran masyarakat dalam pencatatan dan pelaporan kasus KDRT. Selain itu sudah dilakukan upaya-upaya preventif berupa sosialisasi kepada anak sekolah dan organisasi kemasyarakatan.

9. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umum

Tenaga kerja dibawah umur adalah seseorang yang dipekerjakan pada usia anak-anak, menurut pasal 68 UU No. 13 tahun 2003, menyebutkan bahwa *pengusaha dilarang mempekerjakan anak*. Dan dalam ketentuan undang undang tersebut, yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun, berarti 18 tahun adalah usia minimum yang

diperbolehkan pemerintah untuk bekerja, namun didalam UU yang sama pasal 69, 70 dan 71 menjelaskan pengecualian bagi anak yang berumur 13 – 15 th diijinkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.

Persentase dapat dilihat pada Tabel dibawah ini dibawah ini:

Tabel A.10
 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Kabupaten Temanggung
 Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja dibawah umur	1.521	105	N.A	N.A	N.A	N.A
2	Jumlah jiwa anak anak	230.454	114.369	114.292	114.063	113.792	112.439
	Persentase	0,66	0,091				

Sumber : DPPKBPPPA tahun 2019

Penarikan pekerja anak merupakan kewenangan pemerintah provinsi Jawa Tengah, sehingga data yang disajikan dari tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV belum berubah, sesuai hitungan provinsi. Jika kita lihat dari tabel diatas pada tahun 2015 pada angka 0,66 % dan pada tahun 2016 mengalami penekanan penurunan sebesar 0,56% dari 0,66 % ke 0,009%. Sedangkan dari tahun 2017 sampai 2020 semester IV ini kami tidak mendapatkan data, karena belum ada pendataan kembali.

Faktor pendorong dari pencapaian data tersebut adalah telah dilaksanakan program pemerintah , dimana tenaga kerja usia anak , yang disebabkan karena putus sekolah , diarahkan untuk mengikuti program kejar paket dan pelatihan dengan harapan akan memperoleh SDM dan menambah Skill untuk mencari dalam bursa kerja.

Commented [b2]: Bukan lagi kewenangan kabupaten

B. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menurut UU No 52 tahun 2009 adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

Rumus untuk memperoleh hasil laju pertumbuhan adalah Jumlah Penduduk tahun tertentu dibagi jumlah penduduk tahun dasar dikalikan selisih jumlah penduduk tahun P_t dengan P_o

$$r = \frac{(P_t/P_o) \times (1/t) - 1}{x 100}$$

Keterangan:

P_t = Jumlah penduduk pada tahun t

P_o = Jumlah penduduk pada tahun dasar

t = selisih tahun P_t dengan P_o

r = laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 Triwulan IV, sebesar 0,98 %, masih dibawah laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 0,99%.

Tabel B.1
Pertumbuhan Penduduk kabupaten Temanggung
Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk	745.778	752.509	758.980	765.659	791.264	791.264
Laju pertumbuhan penduduk (%)	0,93	0,9	0,86	0,88	0,98	0,98

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Berdasarkan Tabel B 1.1 selama periode 3 tahun yaitu dari tahun 2015 s.d 2017, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami penurunan, dan pada tahun 2018 naik kembali menjadi 0,88 , pada tahun

2019 laju pertumbuhan penduduk kabupaten Temanggung naik 0,1 menjadi 0,98. Pada tahun 2020 belum bisa dihitung karena perhitungan baru bisa dilaksanakan pada akhir tahun yang dipublikasikan pada awal tahun.

2. Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan

Data mikro keluarga merupakan data hasil pengumpulan, pengolahan, berdasarkan pendataan keluarga atau mutasi data keluarga tentang ciri – ciri keluarga meliputi KB (Keluarga Berencana) dan KS (Keluarga Sejahtera) di suatu wilayah sesuai dengan kondisi lapangan dilakukan setiap tahun sekali.

Rumus perhitungan persentase penyediaan data mikro keluarga di desa/kelurahan adalah jumlah KK yang disajikan dibagi dengan jumlah KK x 100%.

Tabel B.2
Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KK yang disajikan	253.878	252.922	256.127	258.194	263.885	225.468
2	Jumlah KK	253.878	252.922	256.127	258.194	263.885	225.468
Persentase		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan

Kabupaten Temanggung tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

Data mikro keluarga merupakan data berkembang yang dilaporkan setiap tahun oleh masing masing kecamatan yang diolah untuk mengetahui perkembangan KK, KB dan KS di Kabupaten Temanggung. Dari hasil laporan kecamatan pada periode tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV, jumlah RW mengalami tambahan yaitu di tahun 2015 bertambah 3, di tahun 2016 bertambah 6 dan di tahun 2017 bertambah 3, sedangkan jumlah KK selama 5 tahun mengalami tambahan dari 253.878 pada tahun 2015 menjadi 263.885 pada tahun 2019, untuk tahun 2020 untuk data masih menggunakan data tahun 2019, dikarenakan pada tahun 2020, kegiatan pendataan keluarga tahun 2020, tidak bisa dilaksanakan karena adanya pandemi covid 19. dan kegiatan yang dilaksanakan setiap 5 tahun ini akan dilaksanakan pada tahun 2021.

3. Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed

Unmetneed merupakan jumlah Pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi (tidak KB) yang terdiri dari pasangan usia subur Ingin Anak Tunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL).

Rumus prosentase Unmetneed : Jumlah pasangan usia subur (PUS) dikurangi jumlah peserta KB aktif dikurangi PUS hamil dan Ingin Anak Segera (IAS)dibagi pasangan usia subur x100 %.

Tabel B.3

Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed) Kabupaten Temanggung tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PUS Unmetneed	8.072	10.292	10.300	9.825	15.309	17.948
2	Jumlah PUS	142.704	144.641	144.401	144.426	133.827	130.415
	Persentase	5,65	5,66	7,13	6,80	11,44	13,76

Semakin kecil jumlah persentase unmetneed maka nilainya semakin baik. Selama periode tahun 2015 – 2020, unmetneed tertinggi di tahun 2020 sebesar 13,76 dari PUS 130.415, dan terendah di tahun 2015 yaitu 5,66 dari PUS 142.704. harapan dari Unmetneed dari tahun ke tahun adalah menurun, namun pada tahun 2019 angkanya naik terus dikarena ada pemutahiran data yang dilaksanakan di lini lapangan, untuk pencapaian pada tahun 2020 Triwulan IV angka unmetneed masih ada kenaikan 2,33 dari 11,43 % menjadi 13, 76 % . Salah satu penyebabnya adalah dampak dari pandemic covid 19, yang mana pelayanan tidak bisa dilaksanakan secara optimal. khususnya pelayanan MKJP , yang mendukung kelestarian Peserta KB aktif .

4. Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th

PUS (pasangan usai subur) adalah pasangan antara laki laki dan perempuan yang didasarkan pada perkawinan yang sah. PUS dibawah 20 th adalah pasangan usia subur yang menikah dengan sah dengan istri berumur kurang dari 20 tahun(UU no 52 tahun 2009 pasal 1 ayat 8)

Rumus dari PUS Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th adalah Jumlah Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th < dibagi jumlah PUS secara keseluruhan dikalikan 100%.

Tabel B.4

**Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th
Kabupaten Temanggung**

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PUS < 20 TH	3.014	3.756	3.861	2.995	2.038	2.823
2	Jumlah PUS	138.891	144.210	143.639	143.830	133.827	130.145
3	Prosentase	2.17	2.60	2,69	2.08	1,52	2,16

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kabupaten Temanggung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PUS dibawah 20 tahun cenderung meningkat dari tahun 2015 sampai th 2017 dan turun pada tahun 2018, pada bulan november 2019 Triwulan IV persentase PUS dibawah 20 tahun cenderung menurun , Pada tahun 2020 ini sudah ada upaya peningkatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang kesehatan reproduksi sehat (KRR) bagi remaja dalam kegiatan PIK Remaja dari jalur organisasi remaja dan jalur sekolah dengan kegiatan SSK (Sekolah Siaga Kependudukan). Pencapaian untuk tahun 2020 Triwulan IV angka nya naik lagi menjadi 2,16 . Hal ini terjadi dari hasil Up dating data di lini lapangan ,ternyata dampak dari pandemi covid , terjadi pernikahan dibawah usia 20 th.

6. Prosentase PUS yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis kontrasepsi modern.

PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahman tentang semua jenis kontrasepsi moderen adalah PUS yang tahu terntang semua alat kontarsespsi dari proses pemasangan,jangka waktu penggunaan ,efektifitas penggunaan dan efek samping dari alat kontrasepsi tersebut. Rumus persentase adalah : jumlah seluruh PUS yang tahu dan paham tentang alat kontrasepsi moderen dibandingkan seluruh jumlah PUS dikalikan 100 %.

Tabel B.5
PUS Yang mengetahui dan memahami tentang alat kontrasepsi modern
Kabupaten Temanggung, tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PUS yang tahu dan memahami alokon modern	115.282	119.019	118.402	119.774	111.117	107.739
2	Jumlah PUS	138.891	144.210	143.639	143.830	133.827	130.415
3	Persentase	83,00	82,53	82,43	83.27	83.03	82,61

7. Perkawinan Usia Anak, (Jumlah dan lokasi pemuda perempuan berumur 20-24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berumur di bawah 18 tahun)

Yang dimaksud perkawinan usia anak menurut UU no 1 tahun 1974 , adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa atau dibawah usia 18 tahun

Untuk mendapatkan angka persentase perkawinan usia anak adalah jumlah perkawinan dari pihak perempuan (usia pertkawinan pertama / UKP) yang berumur dibawah 18 tahun dibagi jumlah pemuda perempuan usia 20 – 24 tahun dikalikan 100 %

Adapun persentase perkawinan usia Anak ini di Kabupaten Temanggung berdasarkan data dari hasil pendataan tahun 2015 adalah :

Tabel B.6

Perkawinan Usia Anak, (Jumlah dan lokasi pemuda perempuan berumur 20-24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berumur di bawah 18 th
Kabupaten Temanggung, tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemuda perempuan dengan usia	n.a	n.a	n.a			

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	perkawinan pertama /UKP dibawah 18 tahun				n.a	n.a	n.a
2	Jumlah pemuda perempuan usia 20 – 24 tahun	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber DPPKBPPPA

Untuk data perkawinan usia anak data yang bersumber Dinas PPKBPPPA baru ada data pada tahun 2015, dari kegiatan pendataan keluarga tahun 2015 yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, namun pada tahun 2020 yang sedianya dilaksanakan kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena adanya pandemi covid 19, dan rencana baru dilaksanakan pada tahun 2021.

Commented [b3]: Jika data hanya tersedia tahun 2015, tahun 2016 sampe 2020 N.A saja?

8. Remaja Perempuan yang hamil, (jumlah dan lokasi penduduk kelompok perempuan pernah kawin umur 15-18 tahun)

Yang dimaksud remaja perempuan hamil adalah kehamilan yang terjadi pada perempuan dibawah usia 20 tahun

Sedangkan persentase remaja perempuan hamil adalah jumlah kehamilan perempuan dibawah usia 20 tahun dibandingkan jumlah kelompok perempuan pernah kawin umur 15 sampai 18 tahun dikalikan 100 %

Untuk data ini belum bisa kami sajikan dikarenakan dalam indikator pendataan belum ada. tentunya hal ini perlu penanganan lebih lanjut dengan melibatkan dinas lintas sektoral, Dinas Kesehatan, Kemenang / KUA dan Dppkbpppa serta Dindukcapil.

9. Persentase kepesertaan KB aktif / Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun

Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur yang secara berkelanjutan menggunakan alat kontrasepsi baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) atau Non MKJP

Rumus Jumlah peserta KB Aktif dibagi jumlah PUS di kali 100

Tabel B.8
Jumlah Peserta KB Aktif Kabupaten Temanggung
tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Peserta KB	115.282	119.019	118.402	119.774	103.717	97.427
2	Jumlah Pasangan Usia subur (PUS)	138.891	144.210	143.639	143.830	133.827	130.415
	Persentase		75,37	83,00	82,53	77,50	74,71

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kecenderungan kepesertaan KB aktif meningkat selama tahun 2015 – 2019, terendah ditahun 2015 dengan kepesertaan KB 75,37 % dari PUS 115.282 dan tertinggi ditahun 2016 dengan total 83,00 % dari PUS 119.019, angka ini merupakan capaian diatas target nasional yaitu sebesar 75%, namun sampai Triwulan IV tahun 2020, pencapaian justru menurun di angka 74,71% , hal ini berdasarkan hasil pemutakhiran data kembali di lini lapangan

Berdasarkan hasil pemutakhiran data yang dilaksanakan pada awal tahun 2019 (April 2019) diperoleh data peserta KB aktif Kabupaten Temanggung 78.75 % dan sampai Triwulan IV,

Selanjutnya pada bulan September 2020 , sebagai dasar rencana pendataan tahun 2021 , Bkkbn bersama PLKB , mengadakan up dating data kembali sebagai dasar kegiatan pendataan keluarga tahun 2021 , yang diperoleh bahwa peserta KB di kabupaten Temanggung sejumlah 97.427 atau 74,71 dari jumlah PUS 130 415 .hal ini disebabkan beberapa faktor :

1. Adanya dampak dari pandemi covid 19 yang berakibat banyak peserta KB yang DO (tidak terdaftar sebagai peserta KB aktif) karena tidak terlayannya sebagai peserta KB terutama KB MKJP(MO , IUD ,Implan)
2. Meningkatnya jumlah yang DO PUS (karena umur 49 ketas . sudah tidak masuk kategori PUS). Yang berakibat juga menurunnya jumlah peserta KB

10. Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang

PUS dengan MKJP adalah jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (Implant, IUD, MOP dan MOW).
Rumus Jumlah peserta KB Metode kontrasepsi jangka panjang dibagi jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi.

Keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang , kabupaten Temanggung tahun 2015 s.d 2020 triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel B.9
Jumlah PUS MKJP Kabupaten Temanggung
Tahun 2015-2020(Triwulan IV)

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Peserta KB MKJP	51.237	55.459	56.553	58.695	49.809	44.212
2	Jumlah (PUS) yang ber -KB	116.543	119.659	119 . 432	120.666	103.717	97.427
	Persentase		44,40	46,35	47,35	48,02	45,38

Sumber: DPPKBPPA Kabupaten Temanggung

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah peserta KB MKJP meningkat dari tahun 2015 – 2020, namun diawal tahun mengalami penurunan menjadi 44,23 % , hal ini disebabkan karena turunnya PUS yang menggunakan alat kontrasepsi .Untuk pencapaian pada Triwulan IV mengalami penurunan dibanding Triwulan III,dengan pencapaian 45,38% ,hal ini terjadi seiring dengan pemutakhiran data dari kecamatan yang pada bulan september 2020 . Pencapaian peserta KB Kabupaten Temanggung masih lebih tinggi dibandingkan pencapaian tingkat propinsi Jawa Tengah

11. Persentase Keluarga Sejahtera III

Keluarga sejahtera III adalah keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan perkembangan keluarga, tetapi

Commented [b4]: Angka ditulis 1 baris agar nyaman dibaca, bisa dikecilkan fontnya

belum dapat memberikan sumbangan secara teratur bagi masyarakat dan tidak aktif sebagai pengurus kegiatan sosial .

Rumus presentase kaluarga sejahtera III adalah jumlah keluarga sejahtera III dibandingkan dengan jumlah keluarga yang ada dikalikan 100 %

Tabel B.10
Presentase Keluarga Sejahtera III Kabupaten Temanggung
Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Keluarga Sejahtera III	44.901	42.777	42.816	61.119	n.a	n.a
2	Jumlah Keluarga	224.509	213.995	213.995	231.702	n.a	n.a
3	Persentase	19,99	19,99	20,01	26,37	n.a	n.a

Sumber: DPPKBPPPA

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah keluarga sejahtera III pada tahun 2020 mencapai angka tertinggi tapi pada tahun 2014 angka persentase lebih rendah , hal ini terjadi karena akibat dari hasil panen tembakau yang kurang mendukung , khususnya didaerah penghasil tembakau , tapi dapat dilihat juga secara perlahan tapi pasti ada kenaikan jumlah keluarga sejahtera dari tahun 2015 sampai tahun 2020

Keluarga sejahtera III adalah salah satu indikator tujuan program KKBPK , sebelum tahun 2018 . Dinas PPKBPPPA kabupaten Temanggung , masih bisa menyajikan tahapan keluarga prasejahtera , keluarga sejahtera III dan III plus , namun mulai tahun 2020 data ini tidak bisa disajikan karena sudah menggunakan aplikasi sistem informasi keluarga (SIGA) , yang ada hanya tahapan keluarga sejahtera.

Commented [b5]: Tahun berikutnya ditulis n.a saja karena memang tidak lagi dihitung

12. Persentase Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga sejahtera III Plus adalah keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis , perkembangan keluarga, salah satu anggota keluarga sudah menjadi pengurus kegiatan sosial

dilingkungannya, dan sudah mampu memberikan sumbangan secara teratur bagi masyarakat

Rumus presentase keluarga sejahtera III Plus adalah jumlah keluarga sejahtera III plus dibandingkan dengan jumlah keluarga yang ada

Tabel B.11
Presentase Keluarga Sejahtera III Plus Kabupaten Temanggung
Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Keluarga Sejahtera III plus	44.901	42.750	42.816	4.429	4.429	4.429
2	Jumlah Keluarga	224.509	213.995	213.995	231.702	225.468	225.468
3	Persentase	19,99	19,98	20,01	1,91	1,87	1,87

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah keluarga sejahtera III Plus dari tahun 2015 semakin menurun dan pada tahun 2017 naik kembali , pada tahun 2018 sampai Triwulan IV semakin menurun , hal ini seiring dengan bertambah keluarga sejahtera III , yang dikarenakan sebelumnya mampu memberikan sumbangan rutin , tetapi karena sesuatu hal pada tahun pendataan sudah tidak memberikan sumbangan rutin karena adanya permasalahan hasil tembakau dan juga permasalahan lain

Keluarga sejahtera III plus adalah tujuan utama program KKBPK , sebelum tahun 2018 . Dinas PPKBPPPA kabupaten Temanggung , masih bisa menyajikan tahapan keluarga prasejahtera , keluarga sejahtera III dan III plus , namun mulai tahun 2020 data ini tidak bisa disajikan karena sudah menggunakan aplikasi sistem informasi keluarga (SIGA) , yang ada hanya tahapan keluarga sejahtera.

13.Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW atau Dusun yang memiliki kriteria tertentu,dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan atau Pembangunan

Keluarga (KKBPk) dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis .

Rumus persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM) adalah jumlah seluruh kampung KB dibagi jumlah desa dengan kriteria IDM desa berkembang dikalikan 100 % .

Indek Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indek Ketahanan Sosial (IKS) ,Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekologi(IKL) suatu Desa, IDM ini disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri .

Tujuan penyusunan IDM adalah :

- a. Menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa;
- b. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa

Indek Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan ekonomi, indeks ketahanan desa dan indeks ekologis ,yang terjabar dalam demensi sosial , demensi ekonomi dan demensi ekologi , yang mana dari demensi – demensi tersebut terdiri dari beberapa undikator , sebagai acuan menentukan kriteria suatu desa , yang berhitungannnya dari rata –rata dari IKS,IKE dan IKL)

Kriteria desa berdasarkan IKS, IKE dan IKL ,terdiri dari

A.Desda Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar bwesarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi , dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan .Desa Mandiri atau desa madya adalah desa yang memiliki indek desa membangun lebih besar (>) dari 0,8155.

B.Desda Maju atau yang disebut desa prasembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial , ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa ,kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemeiskinan .desa maju atau desa pramadya adalah desa yang memiliki indek desa membangun kurang dan sama (< dan =) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0, 7072.

C.Desda berkembang atau yang disebut desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju , yang memilikim potensi sumberr daya sosial

,ekonomi , dan ekologi tetapi belum mampu mengelolannya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa , kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan .desa berkembang atau desa Madya adalah desa yang memiliki indek desa membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989 .

D.Deserta tertinggal atau desa pra madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial ,ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolannya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa , kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya .desa tertinggal atau desa pra madya adalah desa yang memiliki indek desa membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989,dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.

E. Desa sangat tertinggal atau yang disebut desa pratama adalah desa yang mengalami kerentangan karena masalah bencana alam , guncangan ekonomi , dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial , ekonomi ,dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya . desa sangat tertinggal atau desa pratama adalah desa yang memiliki indek desa membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907

Dilihat dari kriteria desa diatas , dikabupaten Temanggung tersebar di 266 desa.

Indek desa membangun di kabupaten Temanggung berdasarkan kriteria IDM adalah sebagai berikut

- 1.Kategori desa Mandiri di kabupaten Temanggung ada 10 desa
- 2.Kategori desa berkembang dikabupaten Temanggung ada 195
- 3.Kategori desa Maju dikabupaten Temanggung ada 61
- 4.Kategori desa tertinggal di kabupaten Temanggung tidak ada ,dan
- 5.Kategori desa sangat tertinggal sudah tidak ada

Tabel B.12

Presentase kampung KB yang memenuhi IDM Kabupaten Temanggung Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kampung KB	na	na	20	40	65	66
2	Jumlah Desa dengan kriteria desa	na	na	219	219	218	195

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	berkembang dan tertinggal						
3	Persentase	na	na	9.13	18,26	29,82	33,85

Sumber: DPPKBPPPA dan Dispermades Kabupaten Temanggung

Indek Desa Membangun di kabupaten Temanggung yang terdiri dari 3 kriteria IDM meliputi :

1. Kriteria IDM desa tertinggal tidak ada
2. Desa berkembang ada 195
3. Desa maju ada 61, dan
4. Desa mandiri ada 10 desa.

Dari seluruh jumlah desa di kabupaten Temanggung yang sudah ada kampung KB nya sebanyak 66 desa , dari 66 desa kampung KB sebagian besar masuk kriteria desa berkembang sebanyak 54 desa, desa tertinggal sudah tidak ada , desa maju sebanyak 8desa,desa mandiri 2 desa dan kampung KB yang ada di keluarahan ada 2 kelurahan . Persentase jumlah kampung KB di desa IDM terdiri dari 3.03 % di desa mandiri, 81.82% di desa Berkembang dan12.12 % di desa maju.

Sesuai acuan dan tujuan dari pembentukan kampung KB , diprioritaskan di desa yang sangat tertinggal dan baru berkembang , agar menjadi desa yang maju dan mandiri . maka dari tabel diatas persentase desa kampung KB , adalah dari jumlah kampung KB yang terbentuk dibandingkan desa IDM dengan kriteria tertinggal dan berkembang yaitu sebesar 33,35% . Jumlah tersebut merupakan total pengembangan keseluruhan kampung KB yang ada di temanggung sejak tahun 2016 hingga 2019. Dan untuk selanjutnya kegiatan kampung KB ini untuk kegiatan pengembangan dan pemantapan kampung KB yang sudah dicanangkan , untuk pencananagan kampung KB selanjutnya diarahkan dengan menggunakan dana desa yang ada dan bersifat mandiri.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan DPPPAPPKB dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja DPPPAPPKB dari 20 indikator terdapat 7 indikator Telah Tercapai 100 %, Akan Tercapai 12 Indikator dan 1 Indikator belum mencapai.

Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana adalah sebagai berikut ; Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara umum memiliki Fungsi Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi DPPKBPPPA dimaksud, maka dalam mencapai keberhasilan strategik ini diwujudkan melalui kegiatan pendekatan kemasyarakatan kuantitas, kualitas, keluarga, wilayah paripurna, desentralisasi manajemen pendekatan koordinasi aktif, kemandirian dan kemitraan. Strategik khusus ini bertujuan memperluas jaringan pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan sampai tingkat pedesaan, mempertajam pelayanan program kelompok sasaran Sejahtera III, meningkatkan pelayanan KB yang berkualitas, peningkatan peserta kb dengan metode kontrasepsi jangka panjang , memantapkan dan mengembangkan kampung KB menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak , mewujudkan kecamatan dan desa layak anak ,meningkatkan PUG dan ARG , meningkatkan pelayanan KIE, kegiatan Bina Keluarga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program ekonomi produktif t yaitu “UPPKS“ secara bertahap sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan.

Secara singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana memiliki

mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya yaitu: Merumusan kebijakan teknis dibidang Pembinaan umum dan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

1. Pembinaan terhadap lembaga-lembaga perangkat daerah dibidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Sejahtera;
2. Penyelenggaraan pelayanan umum daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Penyelenggaraan penyusunan data dan informasi daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Penyelenggaraan kesekretariatan daerah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Commented [b6]:

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPKB antara lain :
 1. Masih Rendahnya pemahaman masyarakat tentang program KKBPK Terutama generasi muda tentang persiapan dan perencanaan kehidupan Berkeluarga , yang berakibat masuhnya tinggi angka pernikahan dibawah Umur
 2. Masih tingginya PUS dibawah umur 20 Tahun
 3. Masih tinggi PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (Unmet need)
 4. Rasio jumlah PKB dilapangan dibandingkan dengan jumlah desa yang ada belum memenuhi standar yang diharapkan , karena saat ini jumlah PKB dengan jumlah desa yang ada 1 PKB membina 7 sampai 10 desa, harapannya adalah 1 PKB 2 sampai 3 desa

5. Masih rendahnya cakupan desa kampung KB yang memenuhi IDM (indeks Desa membangun)
6. Terbatasnya anggaran sehingga tidak semua kegiatan dapat terlaksana semaksimal mungkin.
7. Masih lemahnya keterlibatan lintas sektoral dalam mendukung program KKBPK dan Pemberdayaan dan perlindungan anak
8. Belum adanya Perda tentang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Masih rendahnya penghasilan perempuan sebagai salah satu indikator IPG (indeks pembangan gender)
10. Harapan lama sekolah bagi perempuan masih rendah
11. Partisipasi Perempuan dalam pemerintah dipengaruhi peluang seleksi
12. Masih rendahnya persentase PD dalam merencanakan anggaran yang responsif gender /ARG
13. Kemampuan dan keterbasan petugas dalam pendampingan Kasus KDRT

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menyusun perda PPPA.

2.4. *Review terhadap rancangan awal RKP*

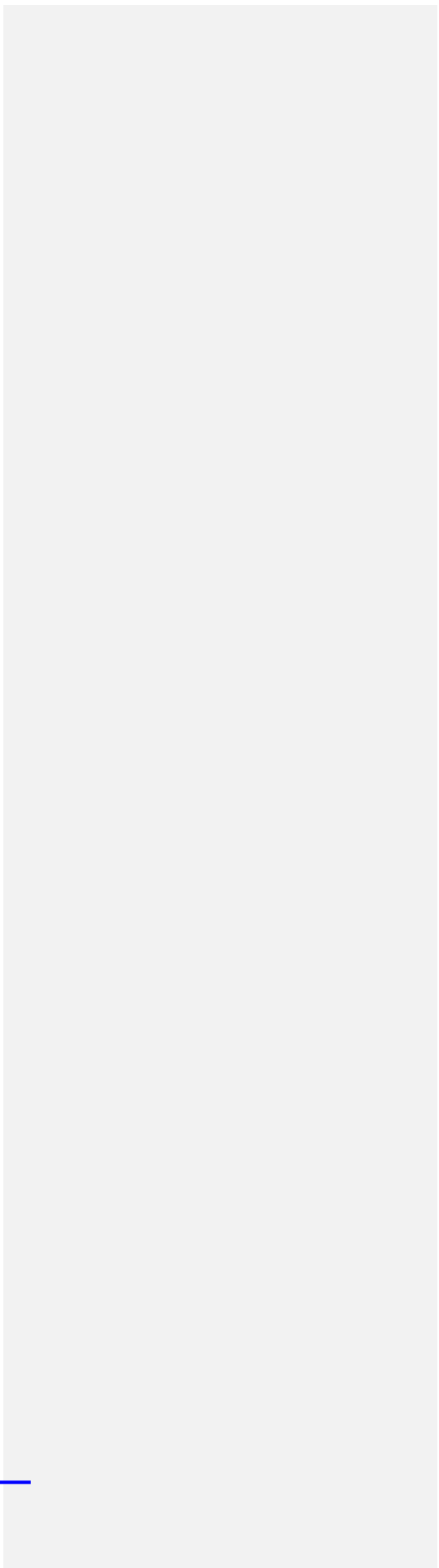
Review atau telaah terhadap rancangan awal RKP adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKP dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKP.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKP adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.4.1
 PERBANDINGAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN ANGGARAN
 Ranwal dan Rancangan Renja 2022

No	Uraian	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jml Sub Keg
1	Rancangan Awal Renja 2022	9	19	38
2	RKPD/ Renja 2022 (Sesuai Permendagri 90/2019)	9	19	38

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4.2 berikut:



Tabel 2.4.2
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
DPPKBPPA Kabupaten Temanggung

No	Bidang / Program / Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD					No	Bidang / Program / Kegiatan	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RKPD				
		lokasi	rincian indikator kinerja	Satuan	target kinerja	pagu indikator awal			lokasi	rincian indikator kinerja	Satuan	target kinerja	pagu indikator perubahan
1	2	4	5	7	6	8	1	2	4	5	7	6	9
	BELANJA LANGSUNG							BELANJA LANGSUNG					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.432.382.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					4.432.382.000
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	DPPPAPPKB	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	bulan	12			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	DPPPAPPKB	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	bulan	12	
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	DPPPAPPKB	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	bulan	12			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	DPPPAPPKB	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	bulan	12	
	penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	DPPPAPPKB	tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan	bulan	12			penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	DPPPAPPKB	tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan	bulan	12	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPPPAPPKB	Tersedianya Makanan dan Minuman	bulan	12	15.491.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPPPAPPKB	Tersedianya Makanan dan Minuman	bulan	12	15.491.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	DPPPAPPKB	Tersedianya Makanan dan Minuman	bulan	12			Penyediaan Makanan dan Minuman	DPPPAPPKB	Tersedianya Makanan dan Minuman	bulan	12	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPPAPPKB	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	bulan	12	25.750.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPPAPPKB	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	bulan	12	25.750.000
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	DPPPAPPKB	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	bulan	12			Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	DPPPAPPKB	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	bulan	12	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPPPAPPKB				546.380.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPPPAPPKB				546.380.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPPAPPKB	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	bulan	12	15.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPPAPPKB	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	bulan	12	15.000.000
	perjalanan dinas dalam daerah	DPPPAPPKB						perjalanan dinas dalam daerah	DPPPAPPKB				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPPAPPKB	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	39.100.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPPAPPKB	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	39.100.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPAPPKB	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	10.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPAPPKB	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	10.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPPAPPKB	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	bulan	12	482.280.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPPAPPKB	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	bulan	12	482.280.000
	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PERKANTORAN							PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PERKANTORAN					
	JASA KEBERSIHAN KANTOR							JASA KEBERSIHAN KANTOR					
	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN GEDUNG/KANTOR							PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN GEDUNG/KANTOR					
	Pemeliharaan Rutin/Berkala	DPPPAPPKB	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala	bulan	12	15.000.000		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	DPPPAPPKB	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala	bulan	12	

	Peralatan Gedung Kantor		Peralatan Gedung Kantor						Peralatan Gedung Kantor				
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPPPAPPKB	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	bulan	12	-		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPPPAPPKB	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	bulan	12	-
	Penyusunan DED Pembangunan balai Penyuluh KB	DPPPAPPKB	tersusunnya rancangan bangunan balai penyuluh KB	keg	1	110.000.000		Penyusunan DED Pembangunan balai Penyuluh KB	DPPPAPPKB	tersusunnya rancangan bangunan balai penyuluh KB	keg	1	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					85.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					85.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					15.000.000
	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL							PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPPAPPKB	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			40.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPPAPPKB	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			40.000.000
	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL							PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPPPAPPKB	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			20.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPPPAPPKB	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			20.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPPPAPPKB	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			10.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPPPAPPKB	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			10.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPPPAPPKB	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPPPAPPKB	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					180.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						450.000.000
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					70.000.000		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						70.000.000
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota							Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab TMG				20.000.000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab TMG					20.000.000
<i>Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG</i>							<i>Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG</i>						
<i>Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG</i>							<i>Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG</i>						
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota							Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						
<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>	Kab TMG						<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>	Kab TMG					
<i>Pelatihan kepemimpinan perempuan dna pengarusutamaan gender</i>							<i>Pelatihan kepemimpinan perempuan dna pengarusutamaan gender</i>						

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					
<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kab TMG					50.000.000	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kab TMG				50.000.000
<i>peningkatan kapasitas organisasi perempuan</i>							<i>peningkatan kapasitas organisasi perempuan</i>					
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						40.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					30.000.000
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kab TMG					20.000.000	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kab TMG				10.000.000
<i>Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>							<i>Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>					
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota							Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						10.000.000	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>					10.000.000

	<i>Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)</i>							<i>Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)</i>					
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kab TMG				10.000.000		<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kab TMG				10.000.000
	<i>Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>							<i>Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>					
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					290.000.000
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab TMG				20000000		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab TMG				290.000.000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUHA dan GSIB							Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUHA dan GSIB					
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					40.000.000
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Kab TMG				20000000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Kab TMG				20.000.000

pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					
advokasi dan pengembangan kota layak anak (KLA)						advokasi dan pengembangan kota layak anak (KLA)					
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab TMG				20000000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab TMG				20.000.000
Penyelenggaraan kegiatan forum anak						Penyelenggaraan kegiatan forum anak					
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					10.000.000
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					10.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					10.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					285.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					345.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					105.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					105.000.000

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						
<i>Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal</i>	KAB TEMANGGU NG						<i>Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal</i>	KAB TEMANGGU NG					
<i>pelayanan kie</i>							<i>pelayanan kie</i>						
<i>Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBP</i>	Kab TMG					55.000.000	<i>Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBP</i>	Kab TMG					55.000.000
<i>Rakor Tim Pembina KB Tingkat Kabupaten</i>							<i>Rakor Tim Pembina KB Tingkat Kabupaten</i>						
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota							Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota						
<i>Penyediaan Data dan Informasi Keluarga</i>	Kab TMG						<i>Penyediaan Data dan Informasi Keluarga</i>	Kab TMG					
<i>Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i>	Kab TMG					50.000.000	<i>Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i>	Kab TMG					50.000.000
<i>Pendataan Keluarga, Pencatatan dan pelaporan KB</i>							<i>Pendataan Keluarga, Pencatatan dan pelaporan KB</i>						
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						150.000.000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						150.000.000
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)							Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)						

	Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal							Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					
	<i>Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK</i>	Kab TMG						<i>Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK</i>	Kab TMG				
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>							<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>					
	<i>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>	Kab TMG						<i>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>	Kab TMG				
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>							<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>					
	<i>Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK</i>	Kab TMG						<i>Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK</i>	Kab TMG				
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>							<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>					
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					
	<i>Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB</i>	Kab TMG						<i>Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB</i>	Kab TMG				
	<i>pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)</i>							<i>pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)</i>					
	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab TMG				30.000.000		Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab TMG				30.000.000

	Penunjang DAK							Penunjang DAK					
	<i>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	Kab TMG						<i>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	Kab TMG				
	<i>Peningkatan kapasitas PPKBD, Sub PPKBD, dan Kader KB</i>							<i>Peningkatan kapasitas PPKBD, Sub PPKBD, dan Kader KB</i>					
	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</i>							<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</i>					
	<i>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	Kab TMG						<i>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	Kab TMG				
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>							<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>					
	<i>Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	Kab TMG						<i>Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	Kab TMG				
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>							<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>					
	<i>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	Kab TMG				100.000.000		<i>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	Kab TMG				100.000.000
	<i>Kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi</i>							<i>Kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi</i>					
	<i>Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	Kab TMG						<i>Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	Kab TMG				

	<i>pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)</i>					<i>pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)</i>				
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				
	<i>Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	Kab TMG				<i>Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	Kab TMG			
	<i>Kegiatan Masyarakat Peduli KB</i>					<i>Kegiatan Masyarakat Peduli KB</i>				
	<i>Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</i>	Kab TMG			20.000.000	<i>Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</i>	Kab TMG			20.000.000
	<i>Pengembangan dan pemantapan kampung KB</i>					<i>Pengembangan dan pemantapan kampung KB</i>				
	<i>Pembinaan Terpadu Kampung KB</i>	Kab TMG				<i>Pembinaan Terpadu Kampung KB</i>	Kab TMG			
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>					<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>				

	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)				30.000.000	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)				90.000.000
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
	<i>Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	Kab TMG			10.000.000	<i>Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	Kab TMG			10.000.000
	<i>Pembinaan Tribina (BKB,BKR,BKL)</i>					<i>Pembinaan Tribina (BKB,BKR,BKL)</i>				
	<i>Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	Kab TMG			10.000.000	<i>Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	Kab TMG			10.000.000
	<i>Koordinasi Penguatan Ekonomi Keluarga Sejahtera</i>					<i>Koordinasi Penguatan Ekonomi Keluarga Sejahtera</i>				
	<i>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i>	Kab TMG				<i>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i>	Kab TMG			-
	<i>Pembinaan Generasi berencana</i>					<i>Pembinaan Generasi berencana</i>				
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan					Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan				-

Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab TMG			10.000.000	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab TMG			70.000.000
Koordinas dan Fasilitasi Program KKBPK					Koordinas dan Fasilitasi Program KKBPK				
Total DAU					Total DAU				
Total DAK					Total DAK				
Total anggaran				4.897.382.000	Total anggaran				5.227.382.000

Sumber : DPPKBPPPA .Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat .

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh DPPPAPPKB Namun dalam proses ini DPPPAPPKB mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh DPPPAPPKB terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1	Program peningkatan kualitas keluarga				
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa pringsurat Kecamatan Pringsurat	Meningkatnnya pengarustamaan Gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	500 ORANG /270.000.000	
2	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)				
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Desa wonokerso Kecamatan Tembarak	Terbinanya remaja dan kelompok BKR	40 ORANG /60.000.000	

--	--	--	--	--	--

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di DPPAPPKB hanya menindak lanjuti program yang ada di propinsi jawa tengah dan program Nasional/ BKKBN , dan dari Kementrian PPPA . untuk DPPAPPKB Kabupaten Temanggung saat ini di tahun 2021 , ada inovasi kegiatan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) yang bisa diterapkan di saat pandemik covid 19 yaitu SILAGA / Simulasi langkah Keluarga (juknis SILAGA telah dibuat)

Tabel 2.6
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	SILAGA (Simulasi Langkah Keluarga)	1. Pik Remaja 2. Duta Genre 3. PPKBD dan Sub PPKBD 4. Institusi Masyarakat Pedesaan / IMP 5. Pelaku KIE	APBD	1. Program Bangga Kencana / Pembangunan Keluarga 2. Perlunya menggalakkan 8 fungsi Keluarga 3. Metode Diskusi dengan menghadirkan narasumber 4. Membuat beberan simulasi dan menyusun pesan 5. Aplikasikan SILAGA dengan kreatifitas moderator	Terlaksannya Kie model KREATIF	Terbentuknya kelompok SILAGA	DPPKBPPPA/ 2021

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPPAPPKB ada 2 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Pemilihan Duta Genre tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2020	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DPPAPPKB
2	Pemilihan kelompok Bina Keluarga Remaja Mutiara Kasih juara terbaik II	Perwakilan BKKBN	Provinsi	DPPAPPKB

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM,SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh DPPKBPPPA lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPPAPPKB

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja DPPAPPKB Tahun 2022 adalah:

- 1) Mewujudkan masyarakat perdesaan dan perkotaan yang Agamis berbudaya dan sejahtera
- 2) Mewujudkan masyarakat Temanggung yang marem ,tentrem dan gendem
- 3) Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
- 4) Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 5) Terwujudnya kota layak anak (KLA)
- 6) Meningkatkan pengarusutamaan gender (PUG) dan Anggaran responsif gender (ARG) dalam proses perencanaan pembangunan .
- 7) Menurunkan angka pernikahan remaja
- 8) Meningkatkan kepesertaan KB
- 9) Meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi MKJP
- 10) Meningkatkan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga
- 11) Meningkatkan prosentase terbentuknya kampung KB yang memenuhi indek Desa Membangun (IDM)
- 12) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;

- 13) Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah;
- 14) Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- 15) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- 16) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

- 1) Terwujudnya masyarakat perdesaan dan perkotaan yang Agamis berbudaya dan sejahtera
- 2) Terwujudnya masyarakat Temanggung yang marem ,tentrem dan gendem
- 3) Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
- 4) Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 5) Terwujudnya kota layak anak (KLA)
- 6) Meningkatnya pengarusutamaan gender (PUG) dan Anggaran responsif gender (ARG) dalam proses perencanaan pembangunan .
- 7) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
- 8) Menurunnya angka pernikahan remaja
- 9) Meningkatnya kepesertaan KB
- 10) Meningkatnya angka pemakaian kontrasepsi MKJP
- 11) Meningkatnya kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga
- 12) terbentunya kampung KB yang memenuhi indek Desa Membangun (IDM)
- 13) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- 14) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah;
- 15) Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- 16) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- 17) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target DPPPAPKB Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
(mengambil dari dokumen renstra)

Tabel . 3.2
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Pada DPPKBPPPA

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2021	TARGET KONDISI AKHIR 2020
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	%	100	100
	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Tersedianya data mikro keluarga di desa atau kelurahan yang lengkap	Program Pengendalian Penduduk	Penyediaan data mikro keluarga di desa atau kelurahan	%	100	100
				Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun	%	100	100
				Presentase Usia Perkawinan Pasangan Usia Subur (PUS) Kurang dari 20 tahun	%	14,3	2,16
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	%	81,23	74,71

				Peserta KB MKJP di Kab Temanggung	%	49	45,48
				Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need)	%	6,72	56,22
				Rasio pembantu pembina keluarga berencana desa / kelurahan	%	100	100
				Terkendalnya Pertumbuhan Jumlah Penduduk	%	0,82	0,98
				Cakupan Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru	%	85,00	76,00
				Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria	%	3,55	4,00
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB	%	81,25	80,00

				Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber-KB	%	86,00	85,00
		meningkatnya presentase keluarga sejahtera		Persentase keluarga sejahtera III plus	%	40,00	40,00
				Cakupan Kampung KB di Desa IDM	%	48,33	29,85
	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban terhadap perempuan	%	0,005	0.0020
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan terhadap anak	%	0,003 4	0.0019
				Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%	30,00	33.33
				Persentase terbentuknya desa layak anak	%	4,15	2,77

			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio Kekerasan dalam rumah tangga		1:42000	1:5601
			Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	96,15	100
	Meningkatkan kesetaraan gender	Meningkatnya kesetaraan gender		Persentase perangkat daerah yang melakukan PPRG	%	75,17	32,28
				Persentase perangkat daerah yang memiliki data pilah gender dan anak	%	40,50	38,45
				Persentase keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten	%	31,11	86,53

Kebijakan dan strategi DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra DPPPAPPKB Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi DPPPAPPKB Tahun 2019-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan DPPPAPPKB Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja DPPPAPPKB Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
DPPPAPPKB Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA DPPPAPPKB TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.924.782.000	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.924.782.000	
a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		
	penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan			penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan		
b	Administrasi Keuangan perangkat daerah		b	Administrasi Keuangan perangkat daerah	<i>3.699.441.000</i>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.699.441.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.699.441.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11.500.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11.500.000	
c	Administrasi Umum	90.061.000	c	Administrasi Umum	93.170.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.500.000	
	penyediaan alat tulis kantor			penyediaan alat tulis kantor		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.820.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.820.000	

Fasilitas Kunjungan Tamu	15.491.000		Fasilitas Kunjungan Tamu	17.100.000	
Penyediaan Makanan dan Minuman			Penyediaan Makanan dan Minuman		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.750.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.325.000	
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	546.380.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	670.510.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.500.000	
perjalanan dinas dalam daerah			perjalanan dinas dalam daerah		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.100.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.010.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	482.280.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000.000	
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PERKANTORAN			PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PERKANTORAN		
JASA KEBERSIHAN KANTOR			JASA KEBERSIHAN KANTOR		
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN GEDUNG/KANTOR			PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN GEDUNG/KANTOR		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15.000.000		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		- 15.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	
Penyusunan DED Pembangunan balai Penyuluh KB	110.000.000		Penyusunan DED Pembangunan balai Penyuluh KB		- 110.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000	+15.000.000
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.491.000	
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	180.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	450.000.000	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	70.000.000		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	70.000.000	
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	20.000.000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	20.000.000	
<i>Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG</i>			<i>Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG</i>		
<i>Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG</i>			<i>Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG</i>		
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		
<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>			<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>		
<i>Pelatihan kepemimpinan perempuan dan pengarusutamaan gender</i>			<i>Pelatihan kepemimpinan perempuan dan pengarusutamaan gender</i>		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	50.000.000		<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	50.000.000	
<i>peningkatan kapasitas organisasi perempuan</i>			<i>peningkatan kapasitas organisasi perempuan</i>		
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	40.000.000		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	40.000.000	
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	20.000.000		<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	20.000.000	
<i>Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>			<i>Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>		
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10.000.000		<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10.000.000	

	<i>Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)</i>			<i>Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)</i>		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10.000.000		<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10.000.000	
	<i>Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>			<i>Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>		
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	290.000.000	
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20000000		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	290.000.000	+90.000.000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUHA dan GSIB			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUHA dan GSIB		
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	90.000.000	+90.000.000
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	20000000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	
	advokasi dan pengembangan kota layak anak (KLA)			advokasi dan pengembangan kota layak anak (KLA)		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000	+ 70.000.000
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20000000		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	
	Penyelenggaraan kegiatan forum anak			Penyelenggaraan kegiatan forum anak		
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	10.000.000	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	285.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	345.000.000	+60.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	105.000.000		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	105.000.000	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		
<i>Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal</i>			<i>Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal</i>		
<i>pelayanan kie</i>			<i>pelayanan kie</i>		
<i>Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK</i>	55.000.000		<i>Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK</i>	40.000.000	
<i>Rakor Tim Pembina KB Tingkat Kabupaten</i>			<i>Rakor Tim Pembina KB Tingkat Kabupaten</i>		
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		
<i>Penyediaan Data dan Informasi Keluarga</i>			<i>Penyediaan Data dan Informasi Keluarga</i>		
<i>Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i>	50.000.000		<i>Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i>	65.000.000	
<i>Pendataan Keluarga, Pencatatan dan pelaporan KB</i>			<i>Pendataan Keluarga, Pencatatan dan pelaporan KB</i>		
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	150.000.000		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	150.000.000	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
<i>Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK</i>	132,759,000		<i>Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK</i>	132,759,000	
<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>			<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>		
<i>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>	0		<i>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>	0	
<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>			<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>		
<i>Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK</i>	1,378,990,800		<i>Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK</i>	1,378,990,800	
<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>			<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>		
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		

	<i>Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB</i>			<i>Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB</i>		
	<i>pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)</i>			<i>pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)</i>		
	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	30.000.000		Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	30.000.000	
	Penunjang DAK			Penunjang DAK		
	<i>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	1,525,920,000		<i>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	1,525,920,000	
	<i>Peningkatan kapasitas PPKBD, Sub PPKBD, dan Kader KB</i>			<i>Peningkatan kapasitas PPKBD, Sub PPKBD, dan Kader KB</i>		
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota		
	<i>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	73,894,700		<i>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	73,894,700	
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>			<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>		
	<i>Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>			<i>Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>		
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>			<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>		
	<i>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	130.000.000+ 1.779.198.500		<i>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	130.000.000+ 1.779.198.500	+150.000.000
	<i>Kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi</i>			<i>Kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi</i>		
	<i>Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>			<i>Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>		
	<i>pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)</i>			<i>pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)</i>		
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
	<i>Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>			<i>Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>		
	<i>Kegiatan Masyarakat Peduli KB</i>			<i>Kegiatan Masyarakat Peduli KB</i>		
	<i>Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</i>	20.000.000		<i>Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</i>	20.000.000	

	<i>Pengembangan dan pemantapan kampung KB</i>	346,170,000		<i>Pengembangan dan pemantapan kampung KB</i>	346,170,000	
	<i>Pembinaan Terpadu Kampung KB</i>			<i>Pembinaan Terpadu Kampung KB</i>		
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>			<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>		
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	30.000.000		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	90.000.000	+60.000.000
	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>			<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>		
	<i>Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	10.000.000		<i>Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	5.000.000	
	<i>Pembinaan Tribina (BKB,BKR,BKL)</i>			<i>Pembinaan Tribina (BKB,BKR,BKL)</i>		
	<i>Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	10.000.000		<i>Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	75.000.000	
	<i>Koordinasi Penguatan Ekonomi Keluarga Sejahtera</i>			<i>Koordinasi Penguatan Ekonomi Keluarga Sejahtera</i>		
	<i>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i>			<i>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i>		+100.000.000
	<i>Pembinaan Generasi berencana</i>			<i>Pembinaan Generasi berencana</i>		
	<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>			<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	-	
	<i>Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	10.000.000		<i>Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	70.000.000	+60.000.000
	<i>Koordinas dan Fasilitasi Program KKBPK</i>			<i>Koordinas dan Fasilitasi Program KKBPK</i>		
	Total DAU			Total DAU	5.609.782.000	
	Total DAK			Total DAK	8.406.959.000	
	JUMLAH			JUMLAH	14.016.741.000	Sesuai hasil desk

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp. 330.000.000 Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja tersebut dikarenakan estimasi yang di mungkinkan ada kenaikan belanja atau anggaran barang dan atau jasa.

2	14	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPPAPPKB	12	bulan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.818.500	90,93	2.500.000	
2	14	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPAPPKB	12	bulan	15.000.000	15.000.000	8.160.000	8.160.000	100	16.500.000	
2	14	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DPPPAPPKB	12	bulan	22.000.000	22.000.000				24.200.000	
					penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DPPPAPPKB	12	bulan			23.639.000	23.556.900	99,65		
X	XX	1	2,03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	DPPPAPPKB	12	bulan	-	-	1.320.000	1.080.000	81,82		
2	14	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	DPPPAPPKB	12	bulan	10.820.000	9.820.000	14.324.500	13.555.250	94,63	10.802.000	
2	14	1	2,06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	DPPPAPPKB	12	bulan	17.100.000	15.491.000				17.040.100	
X	XX	1	2,03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	DPPPAPPKB	12	bulan			21.729.000	19.497.760	89,73	10.000.000	
2	14	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	DPPPAPPKB	12	bulan	25.750.000	25.750.000				28.325.000	
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	DPPPAPPKB	12	bulan			30.450.000	30.307.000	89,73		
2	14	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					546.380.000	506.380.000		34.604.790			
2	14	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	DPPPAPPKB	12	bulan	15.000.000	15.000.000				16.500.000	
					perjalanan dinas dalam daerah							9.250.000	8.195.000	88,59459459		
2	14	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPPAPPKB	12	bulan	39.100.000	39.100.000	35.000.000	26.409.790	75	43.010.000	
2	14	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPAPPKB	12	bulan	10.000.000	10.000.000	-	-		11.000.000	
2	14	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	DPPPAPPKB	12	bulan	566.080.000	442.280.000					
					PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PERKANTORAN							282.400.000	272.738.429	96,57876381		
					JASA KEBERSIHAN KANTOR							5.000.000	4.881.250	97,625		
					PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN GEDUNG/KANTOR							117.330.000	106.032.416	90,37110372		

X	XX	1	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	DPPPAPPKB	12	bulan			15.000.000	9.470.100	63,134	-		
X	XX	1	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPPPAPPKB	12	bulan	-	-	-	-	-	-		
					Penyusunan DED Pembangunan balai Penyuluh KB	tersusunnya rancangan bangunan balai penyuluh KB	DPPPAPPKB	1	keg			110.000.000	-	-			
2	14	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					131.391.000	85.000.000						
2	14	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	DPPPAPPKB	12	bulan	16.900.000	15.000.000					16.500.000	
					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL							67.260.000	31.739.325	47,18900535			
2	14	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPPPAPPKB	12	bulan	79.491.000	40.000.000					44.000.000	
					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL												
2	14	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	DPPPAPPKB	12	bulan	20.000.000	20.000.000					22.000.000	
2	14	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPPPAPPKB	12	bulan	15.000.000	10.000.000					11.000.000	
X	XX	1	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPPPAPPKB	12	bulan			15.000.000	14.535.000	96,90		10.000.000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					500.000.000	170.000.000						

2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					70.000.000	70.000.000					
2	8	2	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota											
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Kab TMG			20.000.000	20.000.000					22.000.000
					<i>Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG</i>							4.279.000	4.138.200	96,70951157		
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota											
2	8	2	2.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Kab TMG									
					<i>Pelatihan kepemimpinan perempuan dan pengarusutamaan gender</i>									0		
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota											
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Kab TMG			50.000.000	50.000.000					55.000.000
					<i>peningkatan kapasitas organisasi perempuan</i>							27.329.500	27.028.200	98,89752831		
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					40.000.000	30.000.000					
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											

2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab TMG	20.000.000	10.000.000	5.218.800	5.191.200	99,47114279	22.000.000	
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota								
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota		10.000.000	10.000.000				11.000.000	
					Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2T/P2A)				5.063.000	5.030.500	99,35808809		
2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								
2	8	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab TMG	10.000.000	10.000.000				11.000.000	
					Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		290.000.000	20.000.000					
2	8	4	2.03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Meujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab TMG	290.000.000	20.000.000				319.000.000	MUSRENB ANG 270.000.0 00
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUHA dan GSB				7.995.800	3.912.850	48,93631657		

2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk												
2	14	2	2.01	9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalar Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalar Non Formal dan Informal		Kab TMG										
					pelayanan kie						54.737.730	30.677.500	56,04452359				
2	14	2	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK		Kab TMG		40.000.000	50.000.000							
					Rakor Tim Pembina KB Tingkat Kabupaten						13.640.000	10.469.125	76,75311584				
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota												
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Kab TMG										
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Kab TMG		65.000.000	50.000.000						55.000.000	
					Pendataan Keluarga, Pencatatan dan pelaporan KB						7.232.620	6.980.600	96,5155089				
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				6.474.798.000	7.834.407.000							
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1.511.749.800								
2	14	3	2.01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK		Kab TMG		132.759.000	120.690.000							DAK
					Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana												
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK		Kab TMG		1.378.990.800	1.253.628.000							DAK

2	14	4	2.01	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab TMG		5.000.000	10.000.000				11.000.000	
					Pembinaan Tribina (BKB,BKR,BKL)					9.329.200	9.278.650	99,4581529		
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab TMG		75.000.000	10.000.000				77.000.000	hasil msrenbang 60000000
					Koordinasi Penguatan Ekonomi Keluarga Sejahtera					6.096.200	6.066.200	99,50789016		
2	14	4	2.01	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab TMG	-	0	-	-	-	-	-	
					Pembinaan Generasi berencana					37.403.400	37.200.172	99,45665902		
2	14	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			-	-	-	-			
2	14	4	2.02	2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab TMG		0					77.000.000	

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi DPPAPPKB untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja DPPAPPKB Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di DPPAPPKB itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan DPPAPPKB dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja DPPAPPKB Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja DPPAPPKB Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.487.988.383 (97,54 %) dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 5.232.695.177 (76,02 %) sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan ini terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 301.601.234 (8,15 %) dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.0 (0 %.)

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 DPPAPPKB mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 5.301.182 .000- (sumber DAU) dan asumsi anggaran dari DAK (Rp 8.349.884.000) yang terdiri dari 9 program antara lain ;Urusan Penunjang pembangunan daerah yang terdiri dari 1 program , 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan; serta Urusan wajib yang terdiri dari 2 urusan Pokok yaitu urusan pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, 8 program, 15 Kegiatan. Dan 24 sub kegiatan

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja DPPPAPKB Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi DPPPAPKB dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 7 September 2021

KEPALA DPPPAPKB

Dra.WARA ANDIJANI,MSi
Pembina Utama Muda
NIP.19611029 199002 2 001